



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyebab *stunting* di Kabupaten Banyumas dikarenakan pola asuh dan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat yang akan mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta secara umum mengacu pada ketentuan ayat (2) huruf a pasal ini yang mengatur bahwa peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa merupakan salah satu pilar Strategi Nasional Penurunan *Stunting* dan secara khusus mengacu huruf b pasal ini yang mengatur bahwa peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat pengaturan terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
 9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1392);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan nasional dan berada di Daerah kabupaten Banyumas.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Desa.
10. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan yang mampu meneropong permasalahan penyebab *Stunting* secara tepat sesuai karakteristik wilayah dan sasaran targetnya menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku masyarakat secara positif.
11. Rencana Aksi adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.
12. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.
13. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah ditentukan bersama untuk menjadi fokus intervensi percepatan penurunan *Stunting*.
14. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
15. Pesan Kunci dalam komunikasi perubahan perilaku adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
16. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
17. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.

18. Advokasi Kebijakan adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku percepatan penurunan *stunting*.
20. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media massa dan atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
21. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.
22. Leaflet adalah lembaran kecil barang cetakan, baik dilipat maupun tidak untuk memudahkan penyebaran dengan tujuan promosi atau mempropagandakan sesuatu.
23. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan.
24. Lembar balik adalah alat bantu yang diperuntukan bagi pendamping untuk membantu memberikan informasi, edukasi dan saran secara efektif kepada sasaran prioritas untuk melakukan komunikasi kelompok dan berdialog secara langsung di sertai dengan ilustrasi dan gambar.
25. Media Penyiaran (*Broadcast*) adalah sarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk menerima informasi tertentu yang disiarkan.
26. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
27. Media Luar Ruang adalah media yang ditempatkan di ruang terbuka (*outdoor/* ruang publik) yang mudah diakses oleh khalayak berupa *billboard/* baliho, spanduk, poster, *neonbox, videotron, dan wall painting*.
28. Media Cetak adalah media statis yang mengutamakan pesan visual yang terdiri dari lembaran, sejumlah kata, gambar, atau foto.
29. Media Online adalah semua sarana komunikasi yang terhubung dengan internet.

30. Media Sosial adalah *platform* digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video serta menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya.
31. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
32. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
33. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Desa, Instansi Vertikal terkait di Daerah, dan/atau organisasi profesi yang terkait kesehatan dalam pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. mengubah perilaku kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting* melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku;
 - c. upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan Daerah;
 - d. terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk Percepatan Penurunan *Stunting* secara bersama-sama;
 - e. perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Daerah;

- g. peningkatan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- h. pelibatan para pihak terkait untuk bersama-sama menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* menggunakan strategi yang sesuai; dan
- i. pengembangan komunikasi perubahan perilaku yang sesuai kearifan lokal dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik demografi, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pasal 3

Ruang lingkup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku *Stunting* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. Sasaran Kegiatan;
- b. Penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku;
- c. Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku;
- d. Rencana Aksi;
- e. Pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku;
- f. Peran Serta Para Pihak; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *Stunting* ditujukan kepada:
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.
- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri dari:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. ibu dengan anak usia 0-23 bulan;
 - d. ibu dengan anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan meliputi bidan, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, dokter, perawat; dan
 - f. kader kesehatan.

- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri atas:
 - a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, yang terdiri dari:
 - a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat Daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

BAB III PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari:

- a. melakukan Analisis Situasi;
- b. menentukan Perilaku Prioritas;
- c. menentukan Kelompok Sasaran;
- d. menentukan identifikasi hambatan;
- e. menyusun struktur dan dimensi Pesan Kunci dan Pesan Pendukung; dan
- f. mengembangkan Saluran Komunikasi.

Bagian Kedua Analisis Situasi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mempertimbangkan data-data program yang tersedia dengan hal-hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.

- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil Analisis Situasi yang adekuat.
- (3) Hasil Analisis Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam percepatan penurunan *Stunting* untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait *Stunting*; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga Penentuan Perilaku Prioritas

Pasal 7

- (1) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai panduan bagi Daerah agar dapat menentukan perilaku yang menjadi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan diutamakan untuk mendapatkan penanganan lebih awal.
- (3) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perilaku yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *Stunting* di Daerah;
 - b. perilaku yang paling mudah untuk diubah, sehingga upaya yang dilakukan bisa segera memberikan hasil; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, bahan dan infrastruktur yang akan memudahkan akses untuk berbagai upaya penyelesaiannya.

Bagian Keempat Penentuan Kelompok Sasaran

Pasal 8

- (1) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok tersier sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kelima Identifikasi Hambatan

Pasal 9

- (1) Menentukan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk mengetahui secara tepat hambatan dalam perilaku kesehatan tertentu sehingga mempermudah solusi penyelesaiannya.
- (2) Hambatan yang harus diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hambatan eksternal, yang berasal dari faktor-faktor yang berada di luar individu yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan perilaku tertentu; dan
 - b. hambatan internal yang berasal dari dalam diri individu berupa hal yang dipercayai, dipikirkan, dan diketahui, yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari.

Bagian Keenam Penyusunan Pesan Kunci dan Pesan Pendukung

Pasal 10

- (1) Pesan Kunci dan pesan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur sebagai berikut:
 - a. Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk; dan
 - b. Pesan Pendukung merupakan bagian penjelasan yang memperkuat isi dari Pesan Kunci dan tetap dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif.
- (2) Perumusan secara kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh Pengembangan Saluran Komunikasi

Pasal 11

- (1) Pengembangan Saluran Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan agar komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.

- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dapat dilakukan menggunakan Saluran Komunikasi dalam bentuk:
- a. pertemuan tatap muka secara langsung; dan
 - b. menggunakan Media Komunikasi Publik, berupa:
 1. Media Cetak, diantaranya berupa:
 - a) *Leaflet*;
 - b) Poster;
 - c) Lembar Balik; dan/atau
 - d) koran.
 2. Media Penyiaran (*broadcast*);
 3. Media Sosial;
 4. Media Online, berupa *website*/situs, dan lain-lain; dan/atau
 5. Media Luar Ruang, diantaranya berupa:
 - a) *billboard*;
 - b) spanduk;
 - c) *poster*; dan/atau
 - d) *wall painting*.
- (3) Saluran tatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan diantaranya melalui :
- a. konseling;
 - b. kunjungan rumah;
 - c. kelas ibu hamil;
 - d. kelas balita;
 - e. kelas calon pengantin;
 - f. pertemuan dan penyuluhan kelompok; dan/atau
 - g. pemicuan.
- (4) Penentuan Saluran Komunikasi memperhatikan prioritas perilaku yang akan diubah, aspirasi dasar, budaya, bahasa dan agama kelompok target sasaran, serta ketersediaan sumber daya lokal untuk mempraktikkan pendekatan komunikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah, Desa, Instansi Vertikal terkait di Daerah, dan/atau organisasi profesi yang terkait kesehatan.

- (2) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Pelaksanaan secara kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim percepatan penurunan *Stunting* (TPPS) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI

Pasal 13

- (1) Rencana aksi ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran yang memuat tentang penjelasan teknis terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 melalui Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana aksi dan penjelasan teknis terkait strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDEKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pendekatan komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. Advokasi Kebijakan;
- b. Kampanye Publik;
- c. Mobilisasi Sosial; dan
- d. KAP.

Bagian Kedua Advokasi Kebijakan

Pasal 15

- (1) Advokasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi.

- (2) Tujuan Advokasi Kebijakan untuk membentuk koalisi Stunting di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat Desa dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguatan advokasi media.

Bagian Ketiga
Kampanye Publik

Pasal 16

- (1) Kampanye Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Kampanye Publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Kampanye Publik Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan pada tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan dan Desa.

Bagian Keempat
Mobilisasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pendekatan Mobilisasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Proses Mobilisasi Sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a. melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Stunting* dan semua upaya terkait percepatan penurunannya;
 - b. berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten dan masyarakat;
 - c. menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program Percepatan Penurunan *Sunting*; dan
 - d. dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.

Bagian Kelima
KAP

Pasal 18

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan pesan secara personal dengan tujuan mengubah secara positif perilaku individu atau kelompok.
- (2) KAP dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam bentuk diskusi maupun penyuluhan.
- (3) Pelaksanaan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
 - a. kegiatan konseling kesehatan di desa atau pelayanan kesehatan;
 - b. kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan terkait faktor risiko *Stunting*;
 - c. penyuluhan kelompok kepada masyarakat, misalnya di forum-forum kesehatan;
 - d. kegiatan penyuluhan kelompok saat pelaksanaan kelas ibu hamil;
 - e. kegiatan pengendalian malaria yang melibatkan partisipasi masyarakat;
 - f. kegiatan penyuluhan pada meja 4 (empat) di Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. kegiatan pemicuan di masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.

BAB VII
PERAN SERTA PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pihak-pihak yang berperan serta dalam perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peran serta sektor kesehatan;
- b. peran serta sektor non kesehatan; dan
- c. peran serta masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Peran Serta Sektor Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* dengan peran serta sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melibatkan unit dan lintas program pada Dinas Kesehatan beserta jajarannya melalui kerjasama secara konvergen.

- (2) Peran sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendataan masalah;
 - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
- (3) Sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Saluran Komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
- (4) Saluran Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, dan pos pelayanan terpadu.
- (5) Pelayanan Saluran Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Sektor Non Kesehatan

Pasal 21

- (1) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari:
 - a. sektor non kesehatan tingkat Daerah;
 - b. sektor non kesehatan tingkat kecamatan; dan
 - c. sektor non kesehatan tingkat kelurahan/Desa.
- (2) Peran serta sektor non kesehatan yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku *Stunting*.
- (3) Peran serta sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. agar strategi berjalan sesuai target yang ditetapkan;
 - b. mendukung pelaksanaan strategi melalui keterlibatan secara aktif;
 - c. menyediakan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran dan pembiayaan; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan komunikasi perubahan perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (4) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal terkait di Daerah;

- c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi profesi;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. dunia usaha;
- h. institusi pendidikan dan akademisi;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. kader kesehatan;
- k. media massa; dan
- l. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dalam Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* melalui keterlibatannya pada setiap tahapan strategi intervensi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, mendorong dan menggerakkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam Percepatan Penurunan *Stunting* dan perbaikan gizi dalam keluarga dan masyarakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* dititikberatkan pada pencapaian output utama dan capaian program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim TPPS Kabupaten Banyumas minimal satu kali dalam setahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan, memberikan tindakan perbaikan secara cepat, menilai efektifitas kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk tahapan tindak lanjutnya.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelaporan secara periodik dan berjenjang kepada Bupati melalui DPPKBP3A.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI
PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024-2026

STRATEGI KOMUNIKASI (STRAKOM) PERUBAHAN PERILAKU DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2024-2026

Strakom Kabupaten dikembangkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah untuk strategi penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim percepatan penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Banyumas dalam menjalankan mandat untuk mendukung pemerintah Kabupaten menerapkan Strakom Kabupaten secara efektif dan efisien. Strakom Kabupaten ini menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam merencanakan dan melaksanakan keempat pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku *Stunting* (KPPS), termasuk mengoptimalkan mekanisme koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun lingkungan yang kondusif agar mendorong perubahan-perubahan yang diharapkan, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan proses dan dampak kegiatan KPPS terhadap pencegahan *Stunting* di Kabupaten Banyumas.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud

Tersusunnya peraturan tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Banyumas.

1.2 Tujuan

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Banyumas ini memiliki tujuan Meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting*, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

1.3 Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Penurunan *Stunting*

BAB I	<p>Pendahuluan</p> <p>Bab ini berisi tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> dan sistematika penulisan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>.</p>
-------	--

BAB II	<p>Analisis Situasi</p> <p>Bab ini berisi tentang gambaran yang jelas, terperinci dan realistis tentang peluang, sumber daya, tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan keenam perilaku kunci Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Banyumas.</p>
BAB III	<p>Tujuan Komunikasi</p> <p>Bab ini berisi tentang tujuan komunikasi yang memuat capaian yang diharapkan dari intervensi komunikasi yang dilaksanakan. Tujuan disusun dengan spesifik dan mempertimbangkan hambatan komunikasi pada masing-masing kelompok sasaran, bisa diukur, dan ada rentang waktunya sesuai dengan kaidah SMART.</p>
BAB IV	<p>Strategi Pesan</p> <p>Bab ini berisi strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan Stunting yang menjadi pesan, yang dibagi menjadi pesan kunci dan pesan pendukung dikaitkan dengan perilaku kunci yang telah ditetapkan.</p>
BAB V	<p>Rencana Aksi</p> <p>Bab ini berisi Petunjuk Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> membagi intervensi strategis KPPS menjadi empat pendekatan. Masing-masing pendekatan secara spesifik mengintervensi kelompok sasaran di berbagai tingkatan, dari individu, masyarakat, sosial, hingga pembuat kebijakan.</p>
BAB VI	<p>Rencana Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>Bab ini berisi Tahap Pemantauan dalam seluruh kegiatan KPPS sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan komunikasi tercapai atau perubahan sosial dan perilaku dapat terlihat sebagai dampak dari intervensi KPPS yang dilaksanakan.</p>

BAB II ANALISIS SITUASI

Sebagai langkah awal pengembangan strategi komunikasi dengan pendekatan KPPS untuk pencegahan Stunting, perlu dilakukan analisis terhadap situasi dan kondisi di Kabupaten Banyumas. Analisis situasi ini mencakup:

1. Analisis perilaku dari enam perilaku kunci pencegahan Stunting sebagai langkah untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi sekaligus menentukan hambatan yang paling dominan dan perlu segera ditanggulangi.
2. Analisis kelompok sasaran untuk identifikasi karakteristik individu dan/atau organisasi serta perubahan apa yang diharapkan dari mereka untuk berkontribusi dalam upaya percepatan pencegahan *Stunting*.
3. Analisis saluran komunikasi dan pelibatan masyarakat untuk merencanakan ragam saluran komunikasi dan kegiatan pelibatan masyarakat yang efektif untuk menjangkau dan mempengaruhi kelompok sasaran agar perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan.

2.1. Analisis Perilaku

Analisis perilaku dilakukan untuk menjawab bagaimana praktik enam perilaku kunci pencegahan Stunting telah dilaksanakan. Data bisa diambil dari sumber-sumber yang sudah ada misalnya data analisis situasi oleh tim konvergensi Kabupaten, data Riskesdas, serta bisa diperkaya dengan diskusi terarah (FGD) kepada pekerja lapangan seperti petugas PKK, tenaga kesehatan, dan kader.

Analisis Perilaku dilakukan dengan cara memetakan faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendukung pelaksanaan enam perilaku kunci pencegahan *Stunting*. Analisis perilaku dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *demand-side* dan *supply-side*.

1. *Demand-side* adalah faktor-faktor yang memengaruhi kelompok sasaran yang akan kita targetkan untuk menerapkan enam perilaku kunci pencegahan *Stunting*. Dalam hal ini, kelompok sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan baduta, dan anggota keluarga (CTPS). Faktor-faktor pada *demand side* terkait dengan faktor dari dalam individu itu seperti pengetahuan, sikap, motivasi, dan kepercayaan dirinya) serta faktor dari lingkungan atau interaksi sosialnya misalnya dukungan dari keluarga, teman, interaksi ibu dengan tenaga medis misalnya, aspek budaya terkait norma, tradisi, dan gaya hidup, serta ekonomi.
2. *Supply-side* adalah faktor yang berkaitan dengan penyedia layanan serta kebijakan-kebijakan yang memengaruhi terciptanya lingkungan yang kondusif dalam mendorong perubahan perilaku yang dituju. Faktor-faktor dari *supply side* misalnya terkait dengan kapasitas nakes, ketersediaan air bersih, infrastruktur, regulasi untuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD), dsb.

Analisis perilaku mencakup hambatan komunikasi yang merupakan permasalahan berkaitan dengan perilaku kunci yang dapat diintervensi dengan kegiatan komunikasi. Masalah komunikasi bisa terjadi di tingkatan individu, keluarga atau komunitas, organisasi, serta pembuat kebijakan. Selain itu, analisis perilaku juga menyoroti faktor-faktor pendorong yang bisa memotivasi kelompok sasaran untuk menerapkan perilaku pencegahan *Stunting*.

Tabel 1. Analisis Perilaku, Hambatan Komunikasi, Motivator Perilaku

Perilaku yang diharapkan:	
1. Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) selama masa kehamilan.	
Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<ul style="list-style-type: none"> a. ibu hamil Tidak mengetahui pentingnya minum TTD b. ibu hamil beranggapan Efek samping TTD membuat mual dan sembelit c. keluarga dari Ibu hamil tidak mengingatkan minum TTD d. keluarga tidak mendukung ibu Hamil dalam minum TTD 	<ul style="list-style-type: none"> a. edukasi tentang manfaat TTD untuk kehamilan. b. kader (PMO) mendampingi dan memotivasi Bumil dan keluarga untuk minum TTD. c. suami dan Anggota keluarga mengingatkan Ibu dan keluarganya untuk minum TTD sampai 90 tablet d. pemantauan Konsumsi TTD oleh bidan desa e. minum TTD Bersama saat kelas ibu hamil f. optimalisasi WA Grup sebagai sarana edukasi ibu hamil dan ibu menyusui
Perilaku yang diharapkan:	
2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling.	
Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<ul style="list-style-type: none"> a. ibu hamil dan keluarganya belum memahami manfaat dari partisipasi dalam kelas ibu hamil dan risiko yang dihadapi jika tidak mengikuti kelas. b. tenaga kesehatan dan kader belum melaksanakan komunikasi efektif Secara optimal dalam kelas ibu hamil, sehingga ibu hamil belum memahami manfaat dari kelas ibu hamil. c. monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum optimal sehingga belum diketahui tingkat pemahaman ibu hamil terhadap kelas ibu hamil. d. kurangnya optimalisasi pemanfaatan buku KIA oleh ibu hamil di dalam kelas ibu hamil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. ibu hamil mengetahui cara-cara menjaga asupan gizi yang memadai untuk kesehatan optimal ibu dan bayi. b. ibu hamil berkesempatan meningkatkan pemahaman mengenai perawatan kehamilan, proses kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir sesuai anjuran tenaga kesehatan. c. menekan risiko kematian ibu dan bayi akibat keterbatasan pemahaman ibu hamil dan keluarganya mengenai perawatan ibu hamil dan proses kelahiran.
Perilaku yang diharapkan:	
3. Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran.	

Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<ul style="list-style-type: none"> a. pemahaman ibu tentang pentingnya Makanan tinggi protein dan lemak untuk Baduta(0-23 bulan) kurang b. ibu bekerja menyerahkan PMBA kepada pengasuh atau keluarga sehingga tidak dapat mengontrol secara langsung pemberian PMBA c. kurangnya pemahaman ibu menyusui tentang pentingnya atau manfaat ASI dan MP ASI d. kurangnya Optimalisasi pemanfaatan buku KIA oleh ibu menyusui dalam MP ASI 	<ul style="list-style-type: none"> a. bidan/nakes memberikan informasi tentang PMBA b. kader mendampingi dan memotivasi ibu yang punya Baduta dan keluarga untuk selalu tidak lelah membuat makanan bergizi untuk Baduta, pentingnya makanan seimbang tinggi protein hewani dan Lemak untuk perkembangan otaknya. c. memberikan penyuluhan pentingnya asupan gizi seimbang pada saat kehamilan, dan ibu masa Menyusui sesuai dengan program Isi Piringku d. pemantauan oleh bidan desa Nutrisonist pendampingan ibu menyusui untuk selalu memberikan ASI Eksklusif e. makanan bergizi saat hamil untuk persiapan ASI Bersama saat kelas ibu hamil dan untuk ibu menyusui f. optimalisasi WA Grup Sebagai sarana edukasi ibu hamil dan ibu menyusui g. penyuluhan tentang Pemahaman ibumenyusui terhadap pentingnya Makanan tinggi protein dan lemak untuk Baduta (0-23 bulan) masih kurang h. ibu pekerjamembiasakan memberikan makanan yg berkualitas i. ibu tidak mau berusaha memberikan MP ASI walaupun bekerja j. mengingatkan ibu menyusui untuk membuat makanan baduta bergizi yg tinggi protein k. menganjurkan ibu untuk Memahami MP ASI di dalam buku KIA
Perilaku yang diharapkan: 4. Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya	
Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<ul style="list-style-type: none"> a. ibu atau pengasuh kurang memahami risiko bila tidak memantau tumbuh kembang bayi/anak secara rutin (sedikitnya sekali sebulan). 	<ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan layanan kesehatan dan konseling bagi ibu atau pengasuh balita di posyandu. b. pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin untuk

<ul style="list-style-type: none"> b. kurangnya dukungan dari lingkungan sosial (keluarga, pemberi kerja, tetangga, dll.) kepada orang tua balita untuk tiap bulan dapat membawa anak ke posyandu. c. kekhawatiran atau rasa malu ibu atau pengasuh terhadap tanggapan lingkungan yang negatif jika anak memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya. d. minimnya dukungan dana operasional dari pemangku wilayah setempat untuk kegiatan posyandu dan insentif bagi kader posyandu. 	<p>mencegah dari permasalahan gizi dan penyakit infeksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. deteksi dini permasalahan dalam tumbuh kembang anak.
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>5. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir.</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya motivasi ibu, anak dan anggota keluarga untuk mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting. b. kurangnya pemahaman ibu, anak dan anggota keluarga bahwa cuci tangan pakai sabun dapat menghindari akibat serius, bahkan mematikan, dari penyakit infeksi. c. masyarakat kurang memperhatikan Informasi materi komunikasi dari Puskesmas yang menjelaskan secara spesifik mengenai risiko tidak mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting. 	<p>Pendorong/motivator perilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menekan risiko kesakitan dan kematian bayi dan anak dari penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. b. meningkatkan sarana materi komunikasi di puskesmas melalui poster, <i>Leaflet</i>, Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Media Sosial.
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>6. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepala keluarga belum memahami risiko dampak buang air besar sembarangan (BABS). b. anggapan BAB bersama merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. c. anggapan BAB bermanfaat sebagai pemberian pakan ikan. 	<p>Pendorong/motivator perilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menekan risiko kesakitan dan kematian bayi dan anak dari penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan menggunakan jamban sehat. b. lingkungan sekitar yang bersih, sehat, dan nyaman.

d. tidak ada teguran atau sanksi dari aparat setempat bagi warga yang masih melakukan praktik BABS, yang menyebabkan pencemaran lingkungan.	
---	--

2.2. Analisis Kelompok Sasaran

Dalam melakukan analisis perilaku, perlu ditentukan secara spesifik siapa yang akan menjadi kelompok sasaran. Pemetaan kelompok sasaran bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan:

1. Siapa individu atau kelompok yang harusnya mempraktikkan enam perilaku kunci tersebut, atau yang ingin dipengaruhi untuk mendapatkan manfaat paling besar dari intervensi komunikasi yang akan dilakukan? Contohnya ibu hamil, ibu baduta, keluarga. Ini yang akan termasuk dalam Kelompok Primer. Kelompok primer juga termasuk individu atau kelompok di luar penerima manfaat terbesar yang keputusannya menentukan perilaku penerima manfaat terbesar ini.
2. Dari masing-masing kelompok primer, siapa pihak-pihak yang secara langsung bisa memengaruhi kelompok primer untuk menerapkan perilaku kunci pencegahan Stunting? Jawaban pertanyaan ini merupakan Kelompok Sekunder. Kelompok sekunder juga termasuk individu atau kelompok yang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan kelompok primer.
3. Siapa saja pihak-pihak yang memengaruhi kelompok primer dan sekunder dengan cara membentuk lingkungan yang kondusif bagi kelompok primer untuk menerapkan perilaku kunci, misalnya dengan membentuk norma sosial, menyusun peraturan, mengalokasikan dana, dll. Mereka ini termasuk dalam Kelompok Tersier. Kelompok tersier juga merupakan individu atau kelompok yang menggerakkan kelompok sekunder dengan berbagai cara, seperti menyusun kebijakan/peraturan dan menjadi teladan (*role model*).

Pemilihan individu/kelompok yang memiliki pengaruh langsung (sekunder) dan tidak langsung (tersier) dapat dilakukan melalui diskusi dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Siapa saja yang bisa dipengaruhinya?
2. Seberapa kuat/penting pengaruhnya bagi kelompok primer?
3. Bagaimana sikap individu/kelompok tersebut terhadap perilaku yang disarankan? (mendukung, tidak mendukung, netral).

Kelompok sasaran untuk percepatan penurunan *Stunting* adalah kelompok primer, sekunder dan tersier yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Kelompok Sasaran untuk Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Banyumas.

Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Kelompok Tersier
a. ibu hamil b. ibu balita c. tenaga Kesehatan d. kader Kesehatan	a. suami b. orang tua c. tokoh agama/ masyarakat	a. lurah/kades b. puskesmas c. kepala sekolah d. camat

Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Kelompok Tersier
e. PLKB f. kader BKB	d. ormas e. remaja putri f. keluarga g. pengasuh balita	e. bupati f. Dinas Kesehatan g. rumah sakit h. dindik i. DPPKBP3A j. dinsospermasdes k. dinkanak l. dinperten KP m. TPPKK Kabupaten n. Bappedalitbang o. Dinperkim p. DLH q. Dinkominfo r. Kemenag s. Organisasi Masyarakat dan Mitra
	a. guru sekolah b. ustadz/ustadzah c. bidan Desa d. ketua RT/RW e. ketua TP PKK Desa f. penyuluh Agama	
	a. kader PKK b. pendamping Sosial PKH c. tim pendamping keluarga (TPK)	

Sebagai pelaksanaan kelompok sasaran tersier dalam hal ini adalah kelompok Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang berperan pada bidang pelayanan intervensi spesifik, bidang pelayanan intervensi sensitif, bidang komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam penurunan Stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan serta Peranannya dalam Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Banyumas.

Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan	Tugas/Peran
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik	
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	a. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan intervensi spesifik di Kabupaten Banyumas b. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik di Kabupaten Banyumas
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A, Dinperkim, Dinsospermasdes, Dindik, Dinkominfo, Kemenag, Dinkanak, Bappedalitbang, Dinperten KP, TPK	
Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif	
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	a. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan intervensi sensitif di Kabupaten Banyumas b. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan intervensi sensitif di Kabupaten Banyumas
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A, Dinperkim, Dinsospermasdes, Dindik, Dinkominfo, Kemenag,	

Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan	Tugas/Peran
Dinkanak, Bappedalitbang, Dinperten KP, DLH,	
Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
DPPKBP3A	a. Melaksanakan komunikasi perubahan perilaku berkelanjutan di Kabupaten Banyumas b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku di Kabupaten Banyumas c. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kampanye dan komunikasi publik perubahan perilaku di Kabupaten Banyumas
Dinkominfo	
Dinperkim, Dinsospermasdes, Dindik, Kemenag, Dinkanak, Bappedalitbang, Dinperten KP, DLH, dan Ormas terkait.	
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	
Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	
Bappedalitbang, DPPKBP3A, Dinas Kesehatan	a. Menyusun perencanaan dan penganggaran, monitoring, dan evaluasi kebijakan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Banyumas b. Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan dan Mitra melaporkan hasil monitoring dan Evaluasi ke Ketua TPPS Kabupaten Banyumas setiap 6 bulan sekali
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas, Dinperkim, Dinsospermasdes, Dindik, Dinkominfo, Kemenag, Dinkanak, Dinperten KP, Ormas, Rektor Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas	

2.3. Analisis Saluran Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat

Analisis saluran komunikasi dan kegiatan pelibatan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan bahan menyusun rancangan kegiatan dan saluran komunikasi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang dapat menjadi *platform* bersama kelompok primer dan sekunder, baik yang tengah berlangsung maupun potensial.
2. Mengidentifikasi saluran komunikasi yang dimanfaatkan kelompok primer.
3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pendukung bagi terjadinya komunikasi pada kelompok sekunder maupun tersier.
4. Menyusun kebutuhan media yang berisi pesan-pesan terkait perilaku kunci untuk memicu terjadinya perubahan yang diinginkan.

Analisis saluran komunikasi dan pelibatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan saluran komunikasi ke dalam tiga kelompok di bawah ini:

1. Saluran yang berhubungan dengan unit-unit layanan publik terkait, misalnya fasilitas kesehatan, layanan konseling, kunjungan rumah oleh bidan atau kader, kelas ibu hamil, dan lain sebagainya.
2. Saluran yang berbasis komunitas atau ada di masyarakat. Saluran jenis ini bisa mencakup forum-forum pertemuan desa, pengajian, kelompok gereja, arisan warga, dan lain sebagainya.

3. Saluran multimedia dan kanal-kanal digital yang meliputi media massa dan media sosial maupun media-media hiburan rakyat misalnya pagelaran ludruk, ketoprak, dan lain sebagainya.

Dalam menentukan keragaman saluran yang potensial untuk digunakan, perlu dipertimbangkan kesesuaian saluran dengan kelompok sasaran. Saluran yang sesuai di konteks satu kelompok masyarakat belum tentu pas untuk digunakan di kelompok masyarakat lainnya. Perlu juga mempertimbangkan momen apa yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan saluran komunikasi. Misalnya Hari Anak Nasional dapat digunakan untuk menggaungkan pentingnya kelompok sasaran memperhatikan dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh kembang yang optimal.

Tabel 4. Saluran Komunikasi dan Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Banyumas .

Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Platform bersama & frekuensi	Kebutuhan Media
a. Ibu hamil b. Ibu balita c. Remaja Putri d. Calon Pengantin e. Keluarga f. Pengasuh balita	a. Suami b. Orang tua c. Tokoh agama/ masyarakat d. Ormas e. Guru sekolah f. Ustadz/ustadzah g. Bidan Desa/Kelurahan h. Ketua RT/RW i. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan j. Penyuluh Agama k. Kader Posyandu l. Kader PKK m. PLKB n. Kader BKB o. Pendamping Sosial PKH p. Tim Pendamping Keluarga (TPK)	a. Pengajian 1x sebulan b. Pertemuan RT c. Dawis 1x sebulan d. PKK 1x sebulan e. Posyandu f. <i>WhatsApp Group</i> g. Bina Keluarga Balita h. Kelas Ibu 1x sebulan i. Kunjungan Rumah j. Hari Posyandu k. Sholat Jumat 1x seminggu l. Pertemuan m. <i>WhatsApp Group</i>	a. Buku saku b. Pamflet c. Brosur d. Kartu gambar e. Buku KIA f. BKB Kit g. Pamflet h. Video i. Butir bicara/bahan ceramah j. Film edukasi k. Media Sosial

Tabel 5. Saluran Komunikasi dan Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Kabupaten Banyumas .

Kelompok Sekunder	Kelompok Tersier	Hal yang bisa menggerakkan kelompok sekunder
<ul style="list-style-type: none"> a. Kader Posyandu b. Kader BKB c. Pendamping PKH d. Kader PKK 	<ul style="list-style-type: none"> a. Puskesmas b. Pemerintah Desa/ Kelurahan c. Dinkes d. DPPKBP3A e. Dinsospermasdes f. Dinas Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertemuan dukungan b. Surat dukungan c. Insentif/penghargaan d. <i>Broadcast</i> WA e. Publikasi f. Peningkatan kapasitas
<ul style="list-style-type: none"> a. Suami b. Orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Desa/ Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas b. <i>Broadcast</i> WA c. Insentif/penghargaan
<ul style="list-style-type: none"> a. Ormas b. Guru sekolah c. Bidan Desa/Kelurahan d. Ketua RT/RW e. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan f. PLKB g. Penyuluh Agama 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ormas Afiliasi b. Dinas Pendidikan c. Dinas Kesehatan d. Dinsospermasdes e. DPPKBP3A f. Pemerintah Desa/ kelurahan g. Kemenag 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas b. Surat edaran c. <i>Broadcast</i> WA d. Insentif/penghargaan
<ul style="list-style-type: none"> a. Tokoh agama/ masyarakat b. Ustadz/ustadzah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenag b. Ormas afiliasi c. Tokoh agama senior d. Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat dukungan b. Publikasi

BAB III
TUJUAN KOMUNIKASI

Tujuan Komunikasi memuat capaian yang diharapkan dari intervensi komunikasi yang dilaksanakan. Tujuan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) Fokus pada hambatan komunikasi yang terkait pengetahuan, sikap (motivasi, keyakinan), praktik (keterampilan, kemampuan), dan norma sosial dengan sasaran meningkatkan jumlah ibu dan keluarga dalam 1.000 HPK yang melaksanakan enam perilaku kunci pencegahan *Stunting*.

Tujuan disusun dengan spesifik dan mempertimbangkan hambatan komunikasi pada masing-masing kelompok sasaran, bisa diukur, dan ada rentang waktunya sesuai dengan kaidah SMART yaitu: *Specific* (Spesifik), menyasar suatu masalah komunikasi dan kelompok sasaran tertentu. *Measurable* (Terukur), pencapaian tujuan program KPPS harus bisa terukur. *Achievable* (Dapat Tercapai), tujuan program KPPS dapat dicapai setelah mempertimbangkan kondisi geografis, lingkungan sosial ekonomi, kapasitas, kerangka waktu dan faktor lainnya. *Relevant* (Sesuai), tujuan program KPPS relevan dengan tujuan program pencegahan *Stunting*. *Time-bound* (rentang waktu) Periode intervensi akan dimulai dan berakhir.

Untuk melihat tujuan komunikasi perubahan perilaku *Stunting* (KPPS) Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2026 bisa dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Tujuan Komunikasi untuk Intervensi KPPS 2023-2026

Perilaku kunci 1: Ibu hamil mengonsumsi TTD selama masa kehamilan		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Pada akhir tahun 2026 sebesar 80%	a. Pada akhir tahun 2026, seluruh Nakes (bidan desa/bidan wilayah), Kader telah melakukan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai manfaat dan risiko jika ibu hamil tidak minum TTD.	a. Dukungan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Tablet Tambah Darah (TTD) terpenuhi setiap tahun. b. Adanya surat edaran Bupati tentang kewajiban mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil.
b. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Pada akhir tahun 2026. Sebesar 58%	b. Pada akhir tahun 2026, seluruh PKK, Nakes, Guru sekolah, serta penyuluh agama telah melakukan penyuluhan kepada remaja putri tentang manfaat minum TTD.	
Perilaku kunci 2: Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Pada akhir tahun 2026, 80% ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil.	a. Pada akhir tahun 2026, 100% Nakes dan kader telah melaksanakan sosialisasi manfaat kelas ibu hamil	a. Adanya surat edaran Bupati tentang himbuan mengikuti kelas ibu hamil dan

b. Pada akhir tahun 2026, 80% ibu hamil telah memanfaatkan buku KIA.	b. Pada akhir tahun 2026, 100% kader posyandu telah melakukan sosialisasi manfaat buku KIA	pemanfaatan buku KIA
	c. Pada akhir tahun 2026, 80% Nakes dan PLKB sudah mengikuti orientasi KAP.	b. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan orientasi KAP bagi nakes dan kader.
Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Pada akhir tahun 2026, Persentase Ibu bayi memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Sebesar 80%	a. Akhir tahun 2026, ada 80% keterlibatan kader terintegrasi dengan nakes (minimal 1 kader) dalam pemberian edukasi dan konseling tentang ASI Eksklusif di kelas ibu	a. Akhir tahun 2026 ada dukungan pemimpin wilayah dalam bentuk kebijakan yang mendorong keterlibatan kader dalam kelas ibu hamil
b. Pada akhir tahun 2026, 80% ibu balita mendapatkan edukasi praktik PMBA di kelas ibu balita sesuai anjuran	b. Akhir tahun 2026, ada 60% nakes dan kader mendapat orientasi PMBA	b. Adanya dukungan anggaran untuk orientasi tata laksana gizi buruk.
c. Pada akhir tahun 2026, Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). 80%	c. Akhir tahun 2026, 100% nakes dan kader melaksanakan sosialisasi manfaat MP ASI	c. Dukungan anggaran sosialisasi manfaat MP ASI (Kesehatan Ibu dan Anak)
d. Pada akhir tahun 2026, Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Sebesar 100%	d. Akhir tahun 2026, 30% nakes mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk.	d. Dukungan anggaran untuk pelatihan tata laksana gizi buruk pada tenaga Kesehatan dan masyarakat
Perilaku kunci 4: Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Pada akhir tahun 2026, seluruh anak berusia di bawah	a. Akhir tahun 2026, 100% nakes, kader, dan PLKB telah	a. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

lima tahun (balita) dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu	melaksanakan sosialisasi manfaat pentingnya posyandu.	
b. Pada akhir tahun 2026, 90% anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	b. Akhir tahun 2026, 100% nakes, kader, PLKB dan tenaga lainnya telah melaksanakan sosialisasi manfaat pentingnya PMT dan gizi seimbang.	b. Adanya dukungan anggaran untuk tambahan asupan gizi pada gizi buruk dan kurang
c. Pada akhir tahun 2026, 100% anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	c. Akhir tahun 2026, 100% nakes, kader, PLKB dan tenaga lainnya telah melaksanakan sosialisasi manfaat pentingnya imunisasi.	c. Dukungan anggaran untuk imunisasi dasar lengkap bagi balita
Perilaku kunci 5: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Pada akhir tahun 2026, 100% keluarga mendapatkan informasi tentang manfaat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.	a. Akhir tahun 2026, 100% nakes dan kader melaksanakan sosialisasi tentang manfaat CTPS.	a. Adanya himbauan atau surat edaran bupati tentang penerapan PHBS di masyarakat.
b. Pada akhir tahun 2026, 40% keluarga memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir di depan rumah		b. Adanya dukungan anggaran maupun kebijakan dari Pemdes tentang PHBS. Dengan sarana prasarana susi tangan pakai sabun
Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
a. Pada akhir tahun 2026, persentase 90% keluarga sudah menggunakan jamban sehat.	a. Pada akhir tahun 2026, 100% nakes dan kader sudah melakukan sosialisasi tentang BABS.	a. Adanya perbup tentang penggunaan jamban sehat di masyarakat
b. Pada akhir tahun 2026, 90% keluarga sudah mendapatkan edukasi tentang Manfaat jamban sehat.		b. Adanya dukungan anggaran dari Pemdes untuk pembangunan jamban layak.

<p>c. Pada akhir tahun 2026, 50% kepala keluarga sudah dapat menyebutkan apa saja pentingnya jamban sehat</p>	<p>b. Pada akhir tahun 2026, 240 tokoh agama sudah menghadiri kegiatan sosialisasi mengenai penggunaan jamban sehat untuk pencegahan <i>Stunting</i></p>	<p>c. Pemenuhan sanitasi dengan pemberian jamban sehat bagi masyarakat</p>
---	--	--

BAB IV STRATEGI PESAN

Dalam intervensi KPPS, informasi yang akan disampaikan perlu dikemas menjadi pesan, yang dibagi menjadi pesan kunci dan pesan pendukung dikaitkan dengan perilaku kunci yang telah ditetapkan. Masing-masing pesan kunci akan didukung oleh pesan pendukung. Pesan kunci memuat perilaku atau praktik yang disarankan (*call to action*) dengan kalimat pesan yang spesifik, jelas, dan mudah diingat. Sedangkan pesan pendukung memuat informasi tambahan yang menjelaskan manfaat (aspek “Mengapa”) dari perilaku yang disarankan dan merinci praktik yang direkomendasikan serta solusi untuk mengatasi hambatan (aspek “Bagaimana”).

Penyusunan pesan kunci dan pesan pendukung, serta cara penyampaiannya, menjadi salah satu hal yang krusial dalam intervensi KPPS. Pesan merupakan informasi yang dikemas sedemikian rupa untuk menjelaskan perilaku yang disarankan secara spesifik sehingga kelompok sasaran memahaminya (tahu), serta memotivasi kelompok sasaran dengan menjelaskan manfaat perilaku tersebut dan risikonya jika tidak dilakukan sehingga timbul keinginan mereka untuk melakukannya (mau), dan menjelaskan bagaimana melakukan tindakan tersebut sehingga kelompok sasaran mampu melakukan praktik-praktik yang disarankan.

Dalam penyampaian pesan-pesan, komunikator tidak disarankan untuk mendikte kalimat pesan, karena pesan ini berfungsi sebagai panduan bicara. Tidak dianjurkan juga untuk menjiplak kata per kata, namun disarankan untuk disesuaikan dengan kelompok sasaran. Misalnya dengan menggunakan bahasa daerah, dan disesuaikan dengan format media yang digunakan (apakah pesan disampaikan melalui video, poster, *radio spots*, atau dalam konteks konseling tatap muka).

Tabel 7. Pesan Kunci dan Pesan Pendukung

Pesan untuk kelompok primer	Pesan untuk kelompok sekunder	Pesan untuk kelompok tersier
Perilaku kunci 1: Ibu hamil mengonsumsi TTD selama masa kehamilan		
<u>Pesan kunci:</u>		
Minum TTD Setiap hari satu (1) Tablet selama masa kehamilan atau minimal 90 tablet	Minum TTD bagi ibu hamil sangat penting untuk perkembangan janin perlu dukungan suami dan keluarga	Minum TTD bagi ibu hamil dapat dilaksanakan dengan didukung oleh regulasi di Desa/Kelurahan atau regulasi dari kepala Perangkat Daerah terkait
<u>Pesan Pendukung:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. TTD akan mengurangi resiko masalah pada perkembangan bayi termasuk cacat otak dan tulang belakang. 2. Efek Samping TTD hanya sementara dan tidak berbahaya, dapat dihindari dengan minum TTD pada malam hari sebelum tidur dan setelah makan, serta banyak minum air hangat setelah mengonsumsi TTD. 3. Ibu hamil yang tidak memiliki cukup zat besi akan rentan menderita anemia. Kasus yang parah dapat menyebabkan berat badan bayi saat lahir rendah dan kemungkinan menjadi <i>Stunting</i>. 		

Perilaku kunci 2: Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling		
<u>Pesan Kunci :</u> Ikuti program kelas ibu hamil minimal 4x selama masa kehamilan.	Mengikuti kelas ibu hamil sangat penting untuk melihat tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu hamil yang perlu didukung oleh Suami/keluarga, Nakes, Kader, Ustadz/ustadzah.	Kepala Program kelas ibu hamil didukung dengan regulasi di Desa/Kelurahan, Puskesmas, Dinkes, dan/atau Instansi Vertikal terkait di Daerah diantaranya Kemenag.
<u>Pesan pendukung:</u> 1. Kelas Ibu hamil akan membuat kondisi ibu hamil terpantau kesehatannya 2. Kelas Ibu hamil mencegah resiko AKI dan AKB kelas Ibu hamil mencegah resiko <i>Stunting</i> .		
Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran		
<u>Pesan kunci:</u> Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan diteruskan dengan PMBA sampai baduta.	Untuk pemenuhan gizi bagi bayibaru lahir dan Balita diperlukan asi eksklusif dan PMBA dengan dukungan dari Suami/keluarga, Nakes, Kader, Ustadz/ustadzah.	Kepala Desa/Lurah, Puskesmas, Dinkes, Instansi Vertikal terkait di Daerah diantaranya Kemenag, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendukung regulasi dalam Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan diteruskan dengan PMBA sampai baduta sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas.
<u>Pesan pendukung:</u> 1. Hanya ASI yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi di 6 bulan pertama. 2. Tidak memberikan tambahan makanan lain selain ASI pada 6 bulan pertama. 3. ASI mencukupi semua kebutuhan nutrisi bayi selama 6 bulan pertama. 4. Jumlah porsi MPASI yang diberikan ke bayi disesuaikan dengan tahapan usia. 5. Frekuensi pemberian MPASI pun perlu disesuaikan usia baduta. 6. Tekstur MPASI sesuai usia. 7. Variasi MPASI dibuat menarik dengan bahan pangan lokal. 8. ASI Eksklusif dan PMBA menambah kekebalan tubuh bayi.		
Perilaku kunci 4: Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya		

<u>Pesan Kunci:</u>		
Ayo ke posyandu.	memotivasi untuk hadir di Posyandu di Dukungan oleh Suami/keluarga, Nakes, Kader, Ustadz/ustadzah.	Kepala Desa/Lurah, Puskesmas, Dinkes, dan/atau Instansi Vertikal terkait di Daerah diantaranya Kemenag membuat regulasi Gerakan ke posyandu.
<u>Pesan Pendukung:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan rajin ke posyandu dapat mengetahui tumbuh kembang anak. 2. Timbanglah bayi dan balita ke posyandu setiap bulan untuk mengetahui tumbuh kembang bayi dan balita. 		
Perilaku kunci 5: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir		
<u>Pesan Kunci :</u>		
Ayo Cuci Tangan Pakai Sabun.	Untuk mewujudkan Gerakan cuci tangan pakai sabun harus di dukung oleh Suami/keluarga, Nakes, Kader, Ustadz/ustadzah.	Kepala Desa/Lurah, Puskesmas, Dinkes, Kemenag, membuat regulasi di Desa/Kelurahan dalam penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di masing-masing rumah dan pelayanan publik.
<u>Pesan Pendukung:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci Tangan Pakai Sabun membuat tangan menjadi bersih dan memutus mata rantai perpindahan kuman dan virus kepada orang lain. 2. 5 (lima) waktu penting cuci tangan : sebelum makan, sehabis buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah kontak dengan hewan, dan Sebelum menyiapkan makanan. 3. 6 (enam) langkah cuci tangan pakai sabun akan menghasilkan tangan menjadi bersih maksimal 		
Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat		
<u>Pesan kunci:</u>		
Stop BAB Sembarangan.	untuk menggunakan jamban sehat dan aman tidak BAB sembarang didukung oleh Suami/keluarga, Nakes, Kader, Ustadz/ustadzah.	Kepala Desa/Lurah, Puskesmas, Dinkes, Kemenag, membuat regulasi di Desa/Kelurahan terkait penggunaan jamban sehat dan aman.
<u>Pesan pendukung:</u>		
Dengan BAB di Jamban Sehat mengurangi resiko Diare, serta tidak ada gizi yang terbuang dalam tubuh balita sehingga terhindar dari Stunting.		

BAB V RENCANA AKSI

Petunjuk Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan *Stunting* membagi intervensi strategis KPPS menjadi empat pendekatan. Masing-masing pendekatan secara spesifik mengintervensi kelompok sasaran di berbagai tingkatan, dari individu, masyarakat, sosial, hingga pembuat kebijakan. Berikut adalah empat pendekatan KPPS:

1. Advokasi:

Proses edukasi untuk memotivasi kelompok sasaran yang memiliki pengaruh mengambil tindakan tertentu dalam rangka mendukung upaya pencegahan *Stunting*. Misalnya: menerbitkan peraturan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penurunan *Stunting*, mengalokasikan pendanaan, menetapkan perencanaan untuk perbaikan gizi, dan lain sebagainya.

2. Mobilisasi Sosial:

Proses mempersatukan para pemangku kepentingan (kelompok sasaran sekunder dan tersier) untuk mendorong perubahan di tingkat organisasi dan masyarakat. Mobilisasi Sosial menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan KPP. Bentuk kegiatan diantaranya pelibatan tokoh masyarakat, mengadakan diskusi/dialog, pembentukan koalisi, kegiatan organisasi/kelompok, serta pemanfaatan peringatan hari-hari tertentu untuk mempertahankan momentum.

3. Kampanye Publik:

Proses penyebaran pesan untuk menjangkau berbagai elemen publik melalui media massa, media komunitas, dan media sosial. Kampanye Publik dapat dilakukan melalui program *talk show* di radio atau televisi, tayangan pemberitaan di media massa, bincang-bincang di *podcast*, diseminasi pesan melalui media luar ruang (billboard, spanduk, videotron, mural, dsb.) serta kampanye melalui media sosial (*Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WA blast, SMS blast*).

4. Komunikasi Antar Pribadi:

Dilakukan dalam bentuk percakapan serta interaksi dengan para ibu atau anggota keluarga baik melalui daring atau luring. Melalui KAP, petugas di lini terdepan (tenaga kesehatan, kader) dapat mengedukasi ibu dan anggota keluarga mengenai asupan gizi yang baik dalam 1000 HPK dan memberi saran mengenai cara-cara pencegahan *Stunting*. Bentuk kegiatan pendekatan ini diantaranya adalah penguatan kapasitas nakes dan kader mengenai teknik-teknik KAP dan pembuatan materi konseling atau Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Saat menentukan implementasi dari strategi komunikasi perubahan perilaku *Stunting* (KPPS) atau menyusun Rencana Aksi maka perlu ditentukan apa saja kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing pendekatan KPPS, untuk kelompok sasaran yang mana (primer, sekunder, tersier), serta menggunakan saluran komunikasi apa. Perlu juga direncanakan materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang akan dikembangkan dan digunakan sehingga upaya memotivasi dan meningkatkan kapasitas kelompok sasaran dapat dioptimalkan. Setelah itu perlu ditentukan indikator capaian untuk memastikan bahwa kegiatan, saluran dan materi yang direncanakan telah mempertimbangkan capaian yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta dibuktikan melalui proses dan alat verifikasi yang sesuai.

Untuk melengkapi Rencana Aksi ini, perlu ditetapkan siapa yang menjadi penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan dan kapan

kegiatan dilaksanakan serta frekuensinya untuk memastikan bahwa implementasi dilaksanakan secara bertahap serta berulang untuk mendorong perubahan yang diinginkan, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam perilaku.

Perencanaan ini diperlukan untuk memastikan Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikan Strakom sesuai dengan peran masing-masing. Rencana Aksi juga akan memudahkan Kabupaten/Kota untuk memantau kemajuan proses pelaksanaan Strakom secara berkala.

Tabel 7. Rencana Aksi

Perilaku kunci 1: Ibu Hamil minum TTD (Tablet Tambah Darah)

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas Perangkat Daerah di Kabupaten/ Kota, seperti: DInkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Tim TPPS Kabupaten Banyumas	Penyusunan Rencana Kerja	Bappeda dengan Perangkat Daerah (Tim TPPS)	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan pendampingan ibu hamil minum TTD	Draf SK Bupati Banyumas tentang tim pendamping ibu hamil minum TTD dan pendanaannya	Dinas Kesehatan	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Ibu hamil, Catin masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari	Deklarasi tentang pentingnya minum TTD bagi ibu hamil dan catin/ remaja putri	Dinkes, DPPKBP3A, Dinsospermasdes	1 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
	PKH, Pendamping BKB).	Kesetiakawanan Sosial,	Kesetiakawanan Sosial,			
	Remaja Putri SMP, SMA/SMK, dan Pondok Pesantren	Pertemuan	Sosialisasi/ Penyuluhan	Materi mengenai manfaat TTD	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinsospermasdes (PKK)	4 kali per tahun (PAI) 1 tahun sekali (Dindik)
		Posyandu, Kelas ibu hamil	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	<i>Flyer, leaflet</i>	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KAMPANYE PUBLIK	Ibu hamil, catin dan remaja putri beserta keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya minum TTD pada ibu hamil, catin dan remaja putri	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A, Dindik	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	Talk show, eksplorasi praktik baik, sosialisasi	Pentingnya ASI eksklusif dan PMBA	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
KAP	Ibu hamil, catin dan remaja putri beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul Manfaat TTD bagi ibu hamil, catin dan remaja, poster, pamflet, kartu konseling	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan
	Kader	Pertemuan	Peningkatan Kapasitas Kader	Materi tentang manfaat TTD	Dinsospermasdes dan Dinas Kesehatan	1 kali/ tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
	Ormas	Pertemuan	Peningkatan Kapasitas Ormas	Materi tentang manfaat TTD	DPPKBP3A	1 kali/ tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pendampingan ibu hamil, catin dan remaja putri minum TTD	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang	Kuartal 4

Perilaku kunci 2: Ibu Hamil mengikuti kelas ibu hamil

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten/ Kota, seperti: Dinkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja (Tim TPPS)	Bappedalitbang	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Banyumas	Draf SK Bupati Banyumas tentang tim Pelaksanaan kelas ibu hamil dan penganggarannya	Dinas Kesehatan	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Ibu hamil, masyarakat umum, para pendamping (Nakes/ Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang pentingnya kelas ibu hamil untuk tumbuh kembang bayi dan Kesehatan ibu hamil	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
		Posyandu, Kelas ibu hamil	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	<i>Flyer, leaflet</i>	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
KAMPANYE PUBLIK	Ibu hamil, beserta keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya kelas ibu hamil untuk melihat tumbuh kembang bayi dan Kesehatan ibu hamil	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	Talk show, eksplorasi praktik baik, sosialisasi	Pentingnya kelas ibu hami untuk tumbuh kembang bayi dan kesehatan ibu hamil	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
KAP	Ibu hamil, beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat kelas ibu hamil	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
	Kader posyandu	Pertemuan	Sosialisasi manfaat kelas ibu hamil	Modul manfaat kelas Ibu Hamil	Dinsospermasdes dan Dinas Kesehatan	1 kali per tahun
	Nakes dan PLKB	Pertemuan	Sosialisasi manfaat KAP	Modul KAP	DPPKBP3A dan Dinas Kesehatan	1 kali per tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kelas ibu hamil	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbnag dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4

Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik PMBA sesuai anjuran

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten/ Kota, seperti: DInkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tindak lanjut /rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Draf SK Bupati Banyumas tentang rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Dinkes	2 kali di tahun 2023

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
MOBILISASI SOSIAL	Ibu Menyusui masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali per tahun
	Ibu Hamil dan Ibu Balita	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
	Ibu Balita dan Keluarga	Kampanye	Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Sosialisasi Pemanfaatan Ikan sebagai sumber gizi masyarakat	Dinas Pendidikan, Dinkanak	1 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KAMPANYE PUBLIK	Ibu menyusui dan keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya Asi eksklusif dan PMBA	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A, Dindik	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	Talk show, eksplorasi praktik baik, sosialisasi	Pentingnya ASI eksklusif dan PMBA	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
KAP	Ibu menyusui beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat ASI eksklusif dan PMBA	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan
	Nakes	Tatap muka	Pelatihan	Modul tentang tata laksana gizi buruk	Dinas Kesehatan dan Bappeda	1 kali per tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program	Pertemuan Pelaksana program	Pengembangan rencana dan pemantauan	KAK atau pedoman	Bappedalitbang dan	Kuartal 4

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
	pada PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	evaluasi tentang pelaksanaan Pemberian ASI eksklusif dan PMBA	teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	PERANGKAT DAERAH	
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4

Perilaku kunci 4 : Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten/ Kota, seperti: DInkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tentang posyandu balita aktif	Penyusunan draf tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif	Dinkes dan Dinsospermasdes	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Balita, masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKK, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kese tiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang Manfaat ke posyandu bagi Balita untuk melihat tumbuh kembang kesehatannya	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
	Ibu Hamil dan Ibu Balita	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
KAMPANYE PUBLIK	Ibu yang mempunyai Balita dan keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya kunjungan ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang Kesehatan Balita	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	Talk show, eksplorasi praktik baik, sosialisasi	Kunjungan posyandu untuk mendukung tumbuh kembang anak	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KAP	Ibu yang mempunyai Balita keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat Kunjungan ke Posyandu untuk melihat tumbuh kembang Balita	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kunjungan ke posyandu bagi balita	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4

Perilaku kunci 5 : Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten/ Kota, seperti: Dinkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedaltbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Dinkes, Dinperkim, Dindik	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang Manfaat Cuci tangan pakai sabun	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
		Kesetiakawanan Sosial,				
	Keluarga	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
KAMPANYE PUBLIK	Masyarakat	Media Sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>), Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya Cuci tangan pakai sabun	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	Talk show, eksplorasi praktik baik, sosialisasi	Himbauan penerapan CTPS dengan air mengalir	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/ RENTANG WAKTU
KAP	Masyarakat	Kunjungan rumah, kunjungan sekolah, tempat fasilitas umum	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat Cuci tangan pakai sabun	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan cuci tangan pakai sabun	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalibang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 4

Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/RENTANG WAKTU
KOORDINASI	Kemenag, Dinkes, Dinsos, Bappeda, Dinas PU, Disdik	Pertemuan Pokja STBM	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Agenda pertemuan Pokja STBM	Bappedalitbang, Dinkes, Dinperkim	Triwulan
	Kepala Desa, Camat, Bupati	Pertemuan Pokja STBM	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Agenda pertemuan Pokja STBM	Dinkes, Dinperkim	Triwulan
ADVOKASI	Kemenag, Dinkes, Dinsos, Bappeda, Dinas PU, Disdik	Pertemuan lintas sektor	Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Presentasi	Dinkes, Dinperkim	Triwulan
	CSO: NU, Muhammadiyah	Forum yang dinaungi oleh Kemenag	Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Diskusi/curah pendapat	Dinkes, Dinperkim, Kemenag	Triwulan
	Bupati	Pertemuan	Penyusunan Draft Perbup tentang Jamban Sehat	Diskusi/curah pendapat	Dinkes, Dinperkim, Kemenag	2 kali per tahun

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/RENTANG WAKTU
	Pemdes	Pertemuan	Diskusi	mengenai manfaat jamban sehat	Dinkes, Dinperkim, Kemenag	1 kali per tahun
MOBILISASI SOSIAL	Pemuka agama (Pak Kyai)	Khotbah Jumat dan Pengajian	Pembuatan materi khotbah Jumat dan ceramah yang memuat tentang risiko BABS	Media dakwah tentang bahaya BABS	Kemenag	Kuartal 2
	Kepala Rumah Tangga Pak RT Karang Taruna	Forum pertemuan RT <i>WhatsApp Group</i>	Pertemuan bulanan RT	Poster, pamflet dan ceramah	PKK, Dinsospermasdes	Setiap bulan
	Remaja di Sekolah	Media sosial	<i>Challenge</i> Tiktok/ Instagram	Video/gambar kreatif yang diisi pesan tentang bahaya BABS	Dinperkim, Dinkominfo	Setiap semester
KAMPANYE PUBLIK	Pemuka agama (Pak Kyai) Kepala Rumah Tangga Pak RT Karang Taruna	Media sosial, Media Cetak dan Media Penyiaran (<i>broadcast</i>) Media Luar Ruang	<i>Talkshow</i> interaktif, webinar/seminar, sosialisasi	Sosialisasi penggunaan jamban sehat	Diskominfo, Dinperkim, Dinkes	Triwulan

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PJ	FREKUENSI/RENTANG WAKTU
KAP	Kader	Pelatihan Nakes dan Kader	Pelatihan teknik KAP untuk Nakes dan Kader	Modul dan alat penunjang pelatihan	Dinkes, Dinperkim	Kuartal 2
	Kepala keluarga	KIH, Kunjungan rumah	Pembuatan Materi KIE interaktif	<i>Jingle</i> , video pendek, permainan interaktif	Dinkes	Kuartal 2
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program KPP (lintas PERANGKAT DAERAH)	Pertemuan Pokja KPP	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi KPP dan mekanismenya	Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pertemuan pembahasan monev	Bappedalitbang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 2
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi KPP oleh mitra universitas	KAK untuk perekrutan mitra	Bappedalibang dan PERANGKAT DAERAH	Kuartal 2

5.1. Pengembangan Materi KIE

Mengembangkan materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, karena mengedukasi atau menyampaikan informasi saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Penyampaian materi KIE perlu dilengkapi dengan kegiatan seperti pertemuan komunitas dan advokasi kepada pembuat kebijakan. Materi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi dan/atau disampaikan melalui pertemuan. Perlu juga dipastikan sumber daya yang tersedia dan terjangkau dalam mengembangkan materi KIE. Beberapa materi KIE memerlukan kapasitas tertentu untuk dapat digunakan dengan efektif. Misalnya kartu permainan yang perlu dimodifikasi agar mencapai tujuan yang diinginkan, atau permainan yang memerlukan fasilitator yang dapat menyampaikan pesan dengan cara yang interaktif.

Intervensi KPPS menyarankan penggunaan beragam materi KIE karena format dan jenis materi yang berbeda memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Ada materi KIE yang lebih efektif meningkatkan pemahaman, contohnya poster, kartu konseling dan brosur. Ada format materi KIE yang lebih sebagai pengingat dan pembentuk sikap, seperti pesan-pesan yang disiarkan di radio, TV, atau melalui lagu. Materi KIE seperti drama, permainan, dan lomba digunakan untuk menampilkan sosok teladan (*role models*) untuk ditiru. Materi lainnya yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan konseling atau diskusi dapat berfungsi untuk merencanakan pemecahan masalah. Format lain seperti kelompok sebaya (*peer group*) atau kelompok pendukung (*support group*) dapat memperkuat sikap atau perilaku sehingga menjadi bertahan dalam jangka waktu lama dan konsisten.

Dalam menyusun konten materi KIE, baik teks, visual ataupun audio, perlu dipertimbangkan prinsip 7C berikut ini untuk memastikan agar pesan efektif.

1. *Command attention* (menarik perhatian)
Apakah materi komunikasi menggunakan warna, *font*, gambar, dan grafik yang menarik? Bagaimana dengan efek suara, musik, slogan, dan elemen audio visual lainnya?
2. *Clear message* (pesan jelas)
Apakah pesannya sederhana, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan khalayak?
3. *Communicate a benefit* (menjelaskan manfaat)
Apa manfaat yang langsung bisa didapat khalayak sasaran ketika mereka mengadopsi perilaku yang direkomendasikan? Apa manfaat jangka panjangnya?
4. *Consistency* (konsistensi)
Pesan yang disampaikan di berbagai kegiatan, saluran dan materi komunikasi konsisten mengajak pada perilaku yang sama dan praktik-praktik spesifik yang direkomendasikan.
5. *Create trust* (membangun kepercayaan)
Apakah sumber informasi dapat dipercaya (kredibel) dan disukai oleh khalayak?
6. *Cater to the heart and head* (kombinasi pesan yang rasional dan emosional)
Apakah pesan menyentuh emosi khalayak dan masuk akal?
7. *Call to action* (ada ajakan untuk mengadopsi perilaku)
Apa tindakan nyata yang diharapkan dari khalayak?

5.2. Cara Kreatif Mengemas Pesan Kunci

Dalam membuat materi komunikasi, berbagai pendekatan kreatif dapat digunakan untuk menarik perhatian kelompok sasaran dan menggugah

mereka untuk menerapkan praktik atau perilaku (*call to action*) yang disampaikan.

1. Kekuatan Visual

Materi komunikasi yang menonjolkan kekuatan visual dapat diwujudkan melalui penggunaan gambar, ilustrasi, foto yang menarik hingga pemilihan warna, bentuk dan ukuran tulisan. Materi komunikasi dalam bentuk infografis misalnya, menekankan pada kekuatan elemen visual untuk mengomunikasikan data, statistik maupun informasi lainnya yang kompleks secara atraktif. Pendekatan ini juga efektif jika kelompok sasaran tidak menyukai membaca teks yang panjang atau memiliki tingkat literasi yang rendah. Manusia adalah makhluk visual, dan 90% informasi yang dikirim ke otak manusia adalah visual, bukan teks. Dengan visualisasi pesan dalam kemasan yang mudah dipahami audiens, pesan akan tersampaikan dengan efektif (dimengerti, disukai dan diingat oleh audiens).

2. Kekuatan Kisah (*storytelling*)

Penyampaian pesan juga bisa menggunakan *storytelling* untuk membangun emosi kelompok sasaran. Cara seperti ini juga efektif untuk menggerakkan kelompok sasaran untuk melakukan suatu tindakan atau aksi yang diharapkan. Salah satu iklan layanan masyarakat (ILM) di televisi yang diproduksi oleh Alive & Thrive di Vietnam berjudul "Talking Babies" adalah salah satu produk komunikasi yang menggunakan pendekatan *storytelling* dan terbukti efektif. ILM tersebut mengajak para ibu untuk memberikan ASI eksklusif tanpa tambahan apa pun terutama air putih. Pesan itu disampaikan melalui 'obrolan' dua bayi yang bercerita tentang pengalamannya mendapat ASI eksklusif. Data Alive & Thrive menunjukkan dalam 1 tahun, pemberian ASI eksklusif di Vietnam meningkat dari 22% menjadi 58% setelah kampanye didukung ILM ini berlangsung.

3. Kekuatan Pengalaman (Testimoni)

Cara lainnya juga bisa diterapkan dengan mengangkat cerita asli dari pengalaman seseorang mengenai praktik baik yang telah dilakukannya yang diceritakan secara langsung. Contoh pendekatan ini dapat dilihat dalam video perjalanan menyusui dua orang ibu asal NTT berikut ini yang mewakili Ibu bekerja dan Ibu rumah tangga.

4. Kekuatan Lagu atau Drama

Musik atau lagu dan seni drama juga dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan kepada audiens. Lagu dapat menyampaikan pesan dengan cara menyenangkan dan diulang-ulang, sedangkan drama akan mengandalkan kekuatan *storytelling* yang sudah terbukti efektif memengaruhi perilaku karena manusia senang mendengarkan cerita dan lebih mudah mengingat cerita daripada informasi. Salah satu contoh lagu yang diingat dalam jangka panjang oleh masyarakat adalah "Aku Anak Sehat" yang mempromosikan pemberian ASI, pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan pemberian makanan bergizi.

5. Kekuatan Humor

Pendekatan humor juga bisa diterapkan untuk menarik perhatian kelompok sasaran. Serial pendek 'Cegah Stunting' yang diproduksi oleh BKKBN dengan menampilkan tokoh "Mbah Minto" adalah salah satu contoh pendekatan humor yang juga diselingi dengan penggunaan bahasa daerah Jawa.

5.3. Uji Coba Materi KIE (*pre-testing*)

Uji coba materi (*pre-testing*) adalah proses pengujian rancangan materi termasuk konsep, pesan, dan desain dengan sampel yang representatif (*dummy*) kepada perwakilan kelompok sasaran sebelum materi difinalisasi

dan diproduksi. Uji coba dilakukan untuk memastikan materi mudah dipahami dan diterima oleh khalayak sasaran. Uji coba dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok ataupun wawancara dengan kelompok sasaran.

Proses uji coba penting dilakukan untuk memastikan bahwa materi KIE mudah dipahami dan diterima oleh kelompok sasaran. Tanpa proses uji coba, hasil yang diharapkan bisa tidak sesuai harapan. Ketika ini terjadi, materi mungkin perlu diganti sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan dana. Umumnya, uji coba mengukur lima karakteristik materi komunikasi, yaitu:

1. Dapat dipahami
2. Memiliki daya tarik
3. Dapat diterima sebagai informasi terpercaya
4. Dipandang relevan oleh kelompok sasaran
5. Memotivasi untuk melakukan tindakan yang disarankan

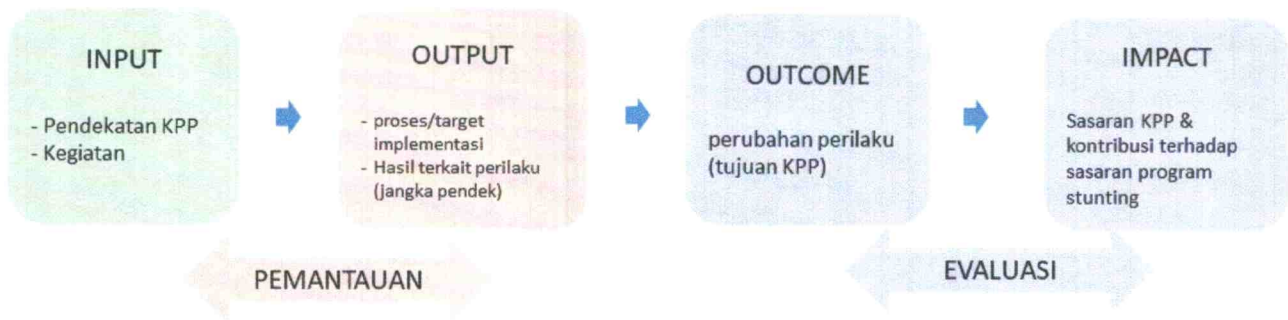
Matriks ini memberikan contoh beberapa pertanyaan yang dapat diajukan saat uji coba.

Dapat dipahami	Menarik	Dapat dipercaya	Relevan	Memotivasi
<p>a. Apakah audiens mengerti isi pesan?</p> <p>b. Apakah mereka memahami arti gambar dan simbol yang digunakan?</p> <p>c. Apakah mereka memahami gaya penulisan (ukuran tulisan cukup besar, mudah dilihat)?</p> <p>d. Apakah informasi yang dimuat terlalu banyak untuk diingat? Ada</p>	<p>a. Apakah ketika melihat atau mendengar, orang akan berhenti untuk menyimaknya?</p> <p>b. Bagaimana warnanya? Apakah menarik? Apakah musiknya menarik?</p> <p>c. Jika ada dua versi yang diuji coba, tanyakan yang mana yang mereka lebih sukai?</p>	<p>a. Apakah ada konten atau elemen lain yang bisa menyinggung orang? Atau mungkin tidak pantas?</p> <p>b. Apakah ada muatan pesan yang isinya meragukan?</p> <p>c. Ada saran untuk perbaikan, agar materinya dapat lebih diterima?</p> <p>d. Agar tidak ofensif untuk beberapa</p>	<p>a. Apakah audiens merasa bahwa pesan/materi diperuntukkan untuk mereka? Atau mereka merasa bahwa materi itu ditargetkan untuk kelompok lain?</p> <p>b. Apakah mereka merasa bahwa pesannya sesuai dengan isu dan ketertarikan mereka?</p> <p>c. Apakah simbol, grafis, bahasa, musik, dsb. juga mereka gunakan</p>	<p>a. Apakah pesan sudah secara spesifik mengajak audiens untuk melakukan sesuatu?</p> <p>b. Apakah menurut audiens, perilaku/praktik yang diminta memungkinkan untuk dilakukan?</p>

Dapat dipahami	Menarik	Dapat dipercaya	Relevan	Memotivasi
saran untuk perbaikan?		kelompok orang.	dalam interaksi sehari-hari?	

BAB VI RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tahap Pemantauan dan Evaluasi adalah tahap penting dalam KPPS yang tidak boleh luput untuk dilakukan. Proses ini dilakukan untuk memantau apakah seluruh kegiatan KPPS sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan komunikasi tercapai atau perubahan sosial dan perilaku dapat terlihat sebagai dampak dari intervensi KPPS yang dilaksanakan. Rencana Pemantauan dan Evaluasi perlu dimasukkan dan dianggarkan dalam Rencana Aksi.



6.1. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur atau melacak apa yang dilakukan (*input* dan *output*) yang berlangsung terus menerus dan berulang, serta bagaimana program tersebut diimplementasikan sesuai rencana. Pemantauan idealnya dilakukan pada saat program KPPS berlangsung, bukan di akhir pada saat seluruh kegiatan selesai dilakukan. Pemantauan yang dilakukan bersamaan dengan implementasi bermanfaat untuk memberikan informasi jika ada perbaikan yang perlu segera dilakukan.

Pemantauan umumnya terbatas pada pelacakan aktivitas dan pengukuran mengenai seberapa sering satu aktivitas dilakukan, atau seberapa banyak orang yang dijangkau, dibutuhkan pemantauan yang lebih luas untuk mengkaji capaian perilaku dan sosial yang terjadi atau hasil dalam jangka pendek.

Dalam KPPS, pemantauan mencakup dua aspek yaitu:

1. Pemantauan Proses (Implementasi): pemantauan yang ditujukan untuk melacak apakah kegiatan (*input*) sudah sesuai, tonggak pencapaian (*milestones*) tercapai, dan aktivitas serta hasil sudah sesuai dengan yang direncanakan, serta melacak *output* dan membandingkannya dengan parameter seperti jangkauan, kualitas, partisipasi, serta kepuasan.
2. Pemantauan Capaian Perilaku (hasil jangka pendek): melihat hasil yang muncul secara berkala (jangka pendek dan menengah) atau perubahan yang muncul di tengah program berjalan berkaitan dengan pengetahuan, sikap, serta perilaku yang diperlukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan teknik partisipatif baik dengan observasi langsung ke khalayak sasaran, wawancara, dan teknik-teknik lainnya.

6.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan perilaku dan sosial yang diinginkan sudah terjadi. Evaluasi juga membantu melihat perubahan yang terjadi secara berkala dan mengukur sejauh mana program dan pendekatan KPP berkontribusi pada tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun menengah, serta dampaknya pada pencegahan Stunting dalam jangka panjang. Proses evaluasi melihat apakah perubahan pada

pengetahuan, sikap, kemampuan, aspirasi atau motivasi yang diperlukan sudah terjadi untuk menuju ke perubahan di tingkat berikutnya, yaitu perubahan perilaku dan perubahan sosial yang diharapkan.

Tabel 8. Rencana Pemantauan Proses Implementasi KPPS

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Advokasi			
SK Bupati tentang pendampingan ibu hamil minum TTD di tingkat Kabupaten Banyumas	<p>a. 1 buah SK Bupati tentang pendampingan ibu hamil minum TTD di tingkat Kabupaten Banyumas</p> <p>b. 27 Kecamatan dan 301 desa regulasi yang dikembangkan</p>	Kualitas SK Bupati tentang pendampingan ibu hamil minum TTD di tingkat Kabupaten Banyumas	Dokumen SK Bupati tentang pendampingan ibu hamil minum TTD di tingkat Kabupaten Banyumas
Penyusunan SK Bupati Banyumas tentang tim Pelaksanaan kelas ibu hamil	1 (satu) buah Penyusunan SK Bupati Banyumas tentang tim Pelaksanaan kelas ibu hamil 40 tim Pelaksanaan kelas ibu hamil di puskesmas	Rancangan SK Bupati tim Pelaksanaan kelas ibu hamil	Dokumen Draf SK Bupati tim Pelaksanaan kelas ibu hamil
Draf SK Bupati Banyumas tentang review Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	1 (satu) buah Draf SK Bupati Banyumas tentang rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Rancangan Draf SK Bupati Banyumas tentang rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Dokumen Draf SK Bupati Banyumas tentang rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Penyusunan draf tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif	1 buah Penyusunan draf tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif	Rancangan Penyusunan draf tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif	Dokumen rancangan tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif
Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	1 buah Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun dan 301 desa Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Rancangan Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Dokumen rancangan tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun
Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Kehadiran 301 desa	Tersosialisasinya kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Pelaksanaan/penerapan jamban sehat
Mobilisasi Sosial			
Implementasi program melalui Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah peserta dan unsur peserta yang mengikuti b. Jumlah kab/kota yang mengadakan penggerakan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggerakan masyarakat b. Keterlibatan mitra dalam penggerakan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Notulensi & dokumentasi kegiatan b. Daftar hadir

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Intensifikasi sosialisasi tentang pentingnya ibu hamil minum TTD, ASI Eksklusif dan PMBA, Pentingnya ke posyandu, pentingnya cuci tangan dan pentingnya jamban sehat atau PHBS	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah forum (formal informal) b. Jumlah audiens dalam tiap forum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhatian saat forum berlangsung b. Pengetahuan dan sikap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil wawancara b. Observasi
Kampanye Publik			
Penyebarluasan informasi, di berbagai media massa, cetak, Media Penyiaran (<i>broadcast</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah media yang digunakan b. Jumlah khalayak yang terpapar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas pemberitaan atau tayangan media b. Interaksi khalayak (jika dalam bentuk talkshow) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Respons audiens b. Analisis konten c. Rekaman tayangan
Iklan Layanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah media yang digunakan b. Frekuensi tereksposnya ILM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejauh mana pesan ditangkap audiens 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Komentar
Desiminasi Risiko BABS di berbagai media massa	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah saluran dan liputan media b. Jumlah kelompok sasaran yang terpapar 	Kualitas pemberitaan dan pemberitaan media	Dokumentasi liputan/ siaran
Komunikasi Antar Pribadi			

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Konseling dan penyuluhan Ibu hamil, catin dan remaja putri beserta keluarganya pentingnya minum TTD bagi ibu hamil dan catin/remaja putri	Jumlah Ibu hamil, catin dan remaja putri yang mengikuti Konseling dan penyuluhan pentingnya minum TTD bagi ibu hamil dan catin/remaja putri	a. Kualitas materi b. Tingkat Partisipasi peserta	Laporan kegiatan konseling dan penyuluhan
Konseling dan penyuluhan langsung Ibu hamil, beserta keluarganya manfaat kelas ibu hamil	Jumlah Ibu hamil, beserta keluarganya	a. Kualitas materi pelatihan b. Tingkat partisipasi peserta c. Tingkat pemahaman peserta	a. Laporan Kegiatan b. <i>Pre & post test</i>
Konseling dan penyuluhan langsung Ibu menyusui beserta keluarganya manfaat Asi eksklusif dan PMBA	Jumlah Ibu menyusui beserta keluarganya	Tingkat partisipasi peserta	a. Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi b. Formulir <i>feedback</i> peserta
Penyebarluasan informasi, testimoni, kepada Ibu yang mempunyai Balita dan keluarganya tentang pentingnya kunjungan ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang Kesehatan Balita, Talk show, eksplorasi praktik baik	Jumlah ibu dan kelaurganya yang mempunyai Balita	a. Kualitas materi pelatihan b. Tingkat partisipasi peserta c. Tingkat pemahaman peserta	a. Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi b. Formulir <i>feedback</i> peserta

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Konseling dan penyuluhan langsung pada Masyarakat , guru dan murid di sekolah manfaat Cuci tangan pakai sabun	Jumlah masyarakat, guru dan murid di sekolah	a. Kualitas materi pelatihan b. Tingkat partisipasi peserta c. Tingkat pemahaman peserta	a. Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi b. Formulir <i>feedback</i> peserta
Pelatihan teknik KAP untuk Nakes dan Kader tentang jamban sehat	Jumlah Nakes dan Kader	Modul dan alat penunjang pelatihan	a. Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi b. Formulir feedback peserta
Pembuatan Materi KIE interaktif bagi kepala keluarga	Jumlah Kepala keluarga	Jingle, video pendek, permainan interaktif	a. Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi b. Formulir feedback peserta
Pertemuan Pokja KPP pelaksana program (PERANGKAT DAERAH) <i>Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi KPP dan mekanismenya</i>	PERANGKAT DAERAH pelaksana	Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pertemuan pembahasan monev	Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi

Tabel 9. Rencana Pemantauan Proses Perubahan

Hasil yang diharapkan untuk kelompok primer	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Ibu baduta			

Hasil yang diharapkan untuk kelompok primer	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Hadir di kegiatan posyandu	Jumlah ibu baduta yang hadir di posyandu	a. Ibu baduta dapat menyebutkan manfaat MPASI b. Ibu baduta puas dengan pelaksanaan posyandu	a. Laporan kab/kota b. Survei di posyandu c. FGD dengan instrumen partisipatif
Menyiapkan MPASI sesuai usia	Jumlah ibu baduta yang menyiapkan MPASI sesuai usia	a. Ibu baduta dapat menyebutkan manfaat MPASI b. Ibu baduta mengetahui cara pemberian MPASI	a. Laporan kab/kota b. Survei atau FGD dengan ibu baduta
Keluarga			
Memberikan MP ASI sesuai usia	Jumlah keluarga yang memberikan MPASI sesuai usia	a. Keluarga dapat menyebutkan jenis makanan MPASI yang diberikan kepada badutanya b. Keluarga dapat menyebutkan risiko pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi bagi tumbuh kembang anak	a. Laporan kab/kota b. FGD

Hasil yang diharapkan untuk kelompok primer	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Ibu Hamil			
Hadir di Kelas Ibu selama masa kehamilan dan menyusui	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah ibu hamil dan ibu menyusui yang hadir di Kelas Ibu b. Jumlah pelaksanaan Kelas Ibu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil dan ibu menyusui dapat menyebutkan manfaat menghadiri sesi Kelas Ibu b. Ibu hamil dan menyusui puas dengan pelaksanaan Kelas Ibu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kab/kota b. Survei peserta kelas Ibu
Hadirnya keluarga inti mendampingi di kelas ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 keluarga inti (suami, ortu, mertua, saudara) hadir di kelas ibu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 keluarga inti dapat menyebutkan manfaat menghadiri sesi Kelas Ibu b. Minimal 1 keluarga inti puas dengan pelaksanaan Kelas Ibu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Absen b. Survei peserta
Kader			
Kader hadir mendampingi di kelas ibu	Minimal 1 kader hadir di kelas ibu	Minimal 1 kader dapat menyebutkan manfaat menghadiri sesi Kelas Ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. Daftar hadir b. Wawancara

Hasil yang diharapkan untuk kelompok primer	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Perdes dan alokasi anggaran	Jumlah Anggaran yang dialokasikan	Konten Rancangan Perdes yang mengakomodo-dir upaya peningkatan Asi Eksklusif	a. APBDes b. Raperdes
Kades, Camat, Bupati, Kemenag			
Dikeluarkannya regulasi di semua lini	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah regulasi di setiap lini b. Jumlah kecamatan/ desa yang telah mengeluarkan regulasi. c. Adanya draft khotbah Jumat. d. Jumlah Kyai/Dai yang mendapatkan sertifikat 	Sudah memasukan pesan kunci dalam khotbah/ pengajian	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan masing-masing instansi b. Laporan rutin STBM c. FGD dengan kyai/dai dan jamaah

Tabel 9. Rencana Implementasi

Perilaku kunci 1: Ibu Hamil minum TTD (Tablet Tambah Darah)

PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI

KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas OPD di Kabupaten/ Kota, seperti: DInkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Penyusunan Rencana Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Bappeda dengan OPD (Tim TPPS)	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan pendampingan ibu hamil minum TTD	Draf SK Bupati Banyumas tentang tim pendamping ibu hamil minum TTD dan pendanaannya	Dinas Kesehatan	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Ibu hamil, Catin masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang pentingnya minum TTD bagi ibu hamil dan catin/ remaja putri	Dinkes, DPPKBP3A, Dinsospermasdes	1 kali per tahun
	Remaja Putri SMP, SMA/SMK, dan Pondok Pesantren	Pertemuan	Sosialisasi/ Penyuluhan	Materi mengenai manfaat TTD	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinsospermasdes (PKK)	4 kali per tahun (PAI) 1 tahun sekali (Dindik)
		Posyandu, Kelas ibu hamil	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	<i>Flyer, leaflet</i>	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali/bulan

KAMPANYE PUBLIK	Ibu hamil, catin dan remaja putri beserta keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik, Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya minum TTD pada ibu hamil, catin dan remaja putri	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A, Dindik	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	Talk show, eksplorasi praktik baik	Videotron, baliho, spanduk, film pendek, poster	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
KAP	Ibu hamil, catin dan remaja putri beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul Manfaat TTD bagi ibu hamil, catin dan remaja, poster, pamflet, kartu konseling	Dinas Kesehatan	1 kali/bulan
	Kader	Pertemuan	Peningkatan Kapasitas Kader	Materi tentang manfaat TTD	Dinas Kesehatan	1 kali/ tahun
	Ormas	Pertemuan	Peningkatan Kapasitas Ormas	Materi tentang manfaat TTD	DPPKBP3A	1 kali/ tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada OPD di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas OPD di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pendampingan ibu hamil, catin dan remaja putri minum TTD	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk	Bappedalitbang	Kuartal 4

				pertemuan monev		
Perilaku kunci 2: Ibu Hamil mengikuti kelas ibu hamil						
PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas OPD di Kabupaten/ Kota, seperti: Dinkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja (Tim TPPS)	Bappedalitbang	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Banyumas	Draf SK Bupati Banyumas tentang tim Pelaksanaan kelas ibu hamil dan penganggarannya	Dinas Kesehatan	2 kali di tahun 2023

MOBILISASI SOSIAL	Ibu hamil, masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang pentingnya kelas ibu hamil untuk tumbuh kembang bayi dan Kesehatan ibu hamil	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali per tahun
		Posyandu, Kelas ibu hamil	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	<i>Flyer, leaflet</i>	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
KAMPANYE PUBLIK	Ibu hamil, beserta keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik, Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya kelas ibu hamil untuk melihat tumbuh kembang bayi dan Kesehatan ibu hamil	Diskominfo, Dinkes	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	Talk show, eksplorasi praktik baik	Videotron, baliho, spanduk, film pendek, poster	Diskominfo, Dinkes	1 kali/bulan
KAP	Ibu hamil, beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan, Dinsospermades, Dinperten KP	1 kali/bulan
	Kader posyandu	Pertemuan	Sosialisasi manfaat kelas ibu hamil	Modul manfaat kelas Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	1 kali per tahun

	Nakes dan PLKB	Pertemuan	Sosialisasi manfaat KAP	Modul KAP	Dinas Kesehatan	1 kali per tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada OPD di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas OPD di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kelas ibu hamil	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbnag dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik PMBA sesuai anjuran						
PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas OPD di Kabupaten/ Kota, seperti: Dinkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	Kuartal 1

ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tindak lanjut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Draf SK Bupati Banyumas tentang rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Dinkes	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Ibu Menyusui masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali per tahun
	Ibu Hamil dan Ibu Balita	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan
	Ibu Balita dan Keluarga	Kampanye	Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Sosialisasi Pemanfaatan Ikan sebagai sumber gizi masyarakat	Dinas Pendidikan, Dinkanak	1 kali per tahun

KAMPANYE PUBLIK	Ibu menyusui dan keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik, Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya ASI eksklusif dan PMBA	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A, Dindik	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	Talk show, eksplorasi praktik baik	Videotron, baliho, spanduk, film pendek, poster	Diskominfo, Dinkes	1 kali/bulan
KAP	Ibu menyusui beserta keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu, kelas ibu hamil	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat ASI eksklusif dan PMBA	Dinas Kesehatan, Dinsospermasdes, Dinperten KP	1 kali/bulan
	Nakes	Tatap muka	Pelatihan	Modul tentang tata laksana gizi buruk	Dinas Kesehatan dan Bappeda	1 kali per tahun
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada OPD di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas OPD di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan Pemberian ASI eksklusif dan PMBA	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbnag dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
Perilaku kunci 4 : Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya						
PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI

KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas OPD di Kabupaten/ Kota, seperti: DInkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tentang posyandu balita aktif	Penyusunan draf tentang penyusunan kebijakan posyandu balita aktif	Dinkes dan Dinsospermasdes	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	Balita, masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kese	Deklarasi tentang Manfaat ke posyandu bagi Balita untuk melihat tumbuh kembang kesehatannya	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali per tahun
			tiakawanan Sosial,			
	Ibu Hamil dan Ibu Balita	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan

KAMPANYE PUBLIK	Ibu yang mempunyai Balita dan keluarganya	Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik, Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya kunjungan ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang Kesehatan Balita	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	Talk show, eksplorasi praktik baik	Videotron, baliho, spanduk, film pendek, poster	Diskominfo, Dinkes	1 kali/bulan
KAP	Ibu yang mempunyai Balita keluarganya	Kunjungan rumah, kunjungan ke Posyandu	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat Kunjungan ke Posyandu untuk melihat tumbuh kembang Balita	Dinas Kesehatan	1 kali/bulan
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada OPD di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas OPD di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kunjungan ke posyandu bagi balita	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4

Perilaku kunci 5 : Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menerapkan CTPS dengan air mengalir						
PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI
KOORDINASI	Dinas-dinas terkait, lintas OPD di Kabupaten/ Kota, seperti: Dinkes, DPPKBP3A,	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	Bappedaltbang	Kuartal 1
ADVOKASI	Forkompida tingkat Kabupaten/ Kota	Pertemuan Koordinasi	Penyusunan Kebijakan tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Penyusunan draf tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Dinkes, Dindik	2 kali di tahun 2023
MOBILISASI SOSIAL	masyarakat umum, para pendamping (Nakes/Kader Posyandu, Pendamping PKH, Pendamping BKB).	Intruksi Bupati pada hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Deklarasi tentang Manfaat Cuci tangan pakai sabun	Dinkes dan DPPKBP3A	1 kali per tahun
	Keluarga	Posyandu	Kunjungan/konseling Posyandu	Flyer, leaflet	Dinkes dan DPPKBP3A, Dinsospermades	1 kali/bulan

KAMPANYE PUBLIK	Masyarakat	Media Sosial, Media Cetak dan Media elektronik, Posyandu	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dialog interaktif tentang pentingnya Cuci tangan pakai sabun	Diskominfo, Dinkes, DPPKBP3A	1 kali/bulan
	Masyarakat umum	Media sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	Talk show, eksplorasi praktik baik	Videotron, baliho, spanduk, film pendek, poster	Diskominfo, Dinkes	1 kali/bulan
KAP	Masyarakat	Kunjungan rumah, kunjungan sekolah, tempat fasilitas umum	Konseling dan penyuluhan langsung	Modul manfaat Cuci tangan pakai sabun	Dinas Kesehatan	1 kali/bulan
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program pada OPD di Kabupaten Banyumas	Pertemuan Pelaksana program lintas OPD di Kabupaten Banyumas	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan cuci tangan pakai sabun	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalibang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi pelaksanaan proses	KAK atau pedoman teknis terkait pemantauan dan evaluasi untuk pertemuan monev	Bappedalitbang dan Dinas Kesehatan	Kuartal 4
Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat						
PENDEKATAN	KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNGJAWAB	FREKUENSI

KOORDINASI	Kemenag, Dinkes, Dinsos, Bappeda, Dinas PU, Disdik	Pertemuan Pokja STBM	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Agenda pertemuan Pokja STBM	Bappedalitbang, Dinkes	Triwulan
	Kepala Desa, Camat, Bupati	Pertemuan Pokja STBM	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Agenda pertemuan Pokja STBM	Dinas Kesehatan	Triwulan
ADVOKASI	Kemenag, Dinkes, Dinsos, Bappeda, Dinas PU, Disdik	Pertemuan lintas sektor	Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Presentasi	Dinas Kesehatan	Triwulan
	CSO: NU, Muhammadiyah	Forum yang dinaungi oleh Kemenag	Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Diskusi/curah pendapat	Dinkes, Kemenag	Triwulan
	Bupati	Pertemuan	Penyusunan Draft Perbup tentang Jamban Sehat	Diskusi/curah pendapat	Dinkes, Kemenag	2 kali per tahun
	Pemdes	Pertemuan	Diskusi	mengenai manfaat jamban sehat	Dinkes, Kemenag	1 kali per tahun
MOBILISASI SOSIAL	Pemuka agama (Pak Kyai)	Khotbah Jumat dan Pengajian	Pembuatan materi khotbah Jumat dan ceramah yang memuat tentang risiko BABS	Media dakwah tentang bahaya BABS	Kemenag	Kuartal 2
	Remaja di Sekolah	Media sosial	<i>Challenge</i> Tiktok/Instagram	Video/gambar kreatif yang diisi pesan tentang bahaya BABS	Dinkominfo	Setiap semester
KAMPANYE PUBLIK	Pemuka agama (Pak Kyai)	Radio dan pesan melalui <i>WhatsApp</i>	<i>Talkshow</i> interaktif		Diskominfo, Dinkes	Triwulan

	Kepala Rumah Tangga	dan media sosial (Facebook)	Webinar/seminar	Butir bicara isi <i>talkshow</i> atau webinar		
	Pak RT					
	Karang Taruna					
KAP	Kader	Pelatihan Nakes dan Kader	Pelatihan teknik KAP untuk Nakes dan Kader	Modul dan alat penunjang pelatihan	Dinas Kesehatan	Kuartal 2
	Kepala keluarga	KIH, Kunjungan rumah	Pembuatan Materi KIE interaktif	<i>Jingle</i> , video pendek, permainan interaktif	Dinas Kesehatan	Kuartal 2
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksana program KPP (lintas OPD)	Pertemuan Pokja KPP	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi KPP dan mekanismenya	Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pertemuan pembahasan monev	Bappedalitbang	Kuartal 2
		Pertemuan/diskusi dengan mitra	Evaluasi KPP oleh mitra universitas	KAK untuk perekrutan mitra	Bappedalibang	Kuartal 2

Tabel 10. Rencana Aksi pada Renstra OPD

Perilaku kunci 1: Ibu Hamil minum TTD (Tablet Tambah Darah)

PENDEK ATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			
							2024	2025	2026	SUMBER DAN A
KOORDINASI	Penyusunan Rencana Kerja	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pemberian dan Konsumsi TTD dengan OPD	42.000.000	47.000.000	52.000.000	APBD

ADVOKASI	Penyusunan Kebijakan pendampingan ibu hamil minum TTD	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan koordinasi LP/LS dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil; Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU
----------	---	-----------------	---	--	---	--	---------------	---------------	---------------	-----

MOBILISASI SOSIAL	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rangkaian kegiatan HKN	96.450.000	101.272.500	101.272.500	APBD
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten	39.000.000	40.000.000	42.000.000	APBD

					Keluarga/ UPPKS)					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengg araan Gerakan Pemberday aan Masyarakat t dan Kesejahter aan Keluarga		550.000. 000	550.000. 000	565.000. 000	APBD
--	--	---------------------	--	--	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	------

				Daerah Kabupaten/Kota						
Sosialisasi/ Penyuluhan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sosialisa si pemberia n tablet tambah darah bagi calon penganti n (catin), ibu hamil	2.000.00 0.000	2.019.00 0.000	2.019.00 0.000	DAU	

						dan remaja putri				
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Penurunan Angka Stunting	25.000.000	25.000.000	45.000.000	APBD

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelengg araan Gerakan Pemberday aan Masyaraka t dan Kesejahter aan Keluarga	Sosialisa si dan Praktek Cuci tangan yang baik dan benar menggun akan sabun	550.000. 000	550.000. 000	565.000. 000	APBD
--	--	---------------------	--	--	--	---	-----------------	-----------------	-----------------	------

				Daerah Kabupate n/Kota						
		Kemenag	Kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama	Pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah	- Fasilitasi Calon pengantin memperole h kursus pranikah	- Sosialisa si Manfaat TTD pada kegiatan Bimbing an Perkawin an calon	485.280. 000	485.280. 000	485.280. 000	Keme nag APBN

						penganti n				
			Kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama	Pengelolaa n KUA dan pembinaa n keluarga sakinah	- Fasilitasi Remaja usia sekolah mendapat kan bimbingan cegah kawin anak	- Sosialisa si Manfaat TTD pada Kegiatan Bimbing an Remaja Usia Sekolah	162.440. 000	162.440. 000	162.440. 000	Keme nag APBN
Kunjungan/k onseling Posyandu dan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Konselin g Kelas Ibu Hamil		1.857.32 8.916	1.873.67 3.000	1.873.67 3.000	DAU

		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksana an Pembangu nan Keluarga melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga	Penyediaa n Biaya Operasion al bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Fasilitasi dalam pengerak an Tim Pendamp ing Keluarga bagi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupat en Banyum as	8.100.00 0.000	8.100.00 0.000	8.400.00 0.000	DAK Non Fisik BOK B
KAMPAN YE PUBLIK	Penyebarluas an informasi, testimoni,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan	sosialisa si dan edukasi melalui medsos, media cetak dan media	294.446. 800	335.669. 000	335.669. 000	APBD

			MASYARAKAT	Kabupaten/Kota		luar ruang				
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Fasilitasi Pemenuhan Alat peraga dalam pemberian informasi terkait program KB	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DAK NON FISIK BOK B

		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Penurunan Angka Stunting	5.000.000	5.000.000	10.000.000	APBD
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial, Media Cetak, Media Luar Ruang	26.691.206	27.308.120	28.603.666	APBD

	Talk show, eksplorasi praktik baik	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rembug stunting	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Audit Kasus Stunting	120.000.000	120.000.000	120.000.000	DAK NON FISIK BOK B

		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931	APBD
KAP	Konseling dan penyuluhan langsung	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Periksa kehamilan (konseling gizi)	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU
	Peningkatan Kapasitas Kader	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM)	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU

			MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota		tingkat Kabupaten dan Kecamatan				
Peningkatan Kapasitas Ormas	DPPKBP3A	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi bagaimana advokasi dan kebijakan dan pendampingan untuk peningkatan partisipasi perempuan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	

Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pendampingan ibu hamil, catin dan remaja putri minum TTD	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
-------------------------	---	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

	Evaluasi pelaksanaan proses	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
--	-----------------------------	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

Perilaku kunci 2: Ibu Hamil mengikuti kelas ibu hamil

PENDEK ATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			
							2024	2025	2026	SUMBER DANA
KOORDINASI	Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pemenuhan Gizi Ibu Hamil Berisiko Stunting	42.000.000	47.000.000	52.000.000	APBD
ADVOKASI	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Banyumas	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan koordinasi LP/LS dalam Penguatan Implementasi Pelayanan	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU

			MASYARAKAT	Kabupaten/Kota		an Kesehatan Masa Sebelum Hamil; Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting				
MOBILISASI SOSIAL	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rangkaian kegiatan HKN	96.450.000	101.272.500	101.272.500	APBD

Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,		MASYARAKAT	Kabupaten/Kota							
	DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten	39.000.000	40.000.000	42.000.000	APBD	
Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Konseling Kelas Ibu Hamil	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000		

			KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota						
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Fasilitas dalam pergerakan Tim Pendamping Keluarga bagi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Banyumas	8.100.000.000	8.100.000.000	8.400.000.000	DAK Non Fisik BOKB

		Dinsospermasdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi Pentingnya Posyandu dalam Rakor TP PKK	550.000.000	550.000.000	565.000.000	APBD
--	--	-----------------	---	---	---	--	-------------	-------------	-------------	------

				Daerah Kabupaten/ Kota						
KAMPAN PUBLIK	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	sosialisasi dan edukasi melalui medsos, media cetak dan media	294.446. 800	335.669. 000	335.669. 000	APBD

			N MASYARAKAT	Kabupaten/Kota		luar ruang				
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial, Media Cetak, Media Luar Ruang	26.691.206	27.308.120	28.603.666	APBD
Talk show, eksplorasi praktik baik	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rembug stunting	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU	

			MASYARAKAT							
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931	APBD
KAP	Konseling dan penyuluhan langsung	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Periksa kehamilan (konseling gizi)	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU

		Dinsospermasdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi penting nya kelas ibu hamil secara berjenjang sampai dengan kelompok dawai	550.000.000	550.000.000	565.000.000	APBD
--	--	-----------------	---	--	---	--	-------------	-------------	-------------	------

				Daerah Kabupate n/Kota						
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

		Dinpertan KP	Penyediaan dan pengembang an prasarana pertanian	Pengemban gan prasarana pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ LCP2B	Kegiata n Pangan Lestari (P2L)	150.000. 000	165.000. 000	165.500. 000	DAK non Fisik
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaa n dan Penyalura n Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuha n Daerah Kabupate	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pelatiha n Pemanf ataan Tanah Pekaran gan dan Pelatiha n Keaman an	160.000. 000	176.000. 000	193.600. 000	APBD Kabup aten Banyu mas

				n/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan		Pangan dan Gizi				
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Perberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Olahan Pangan Lokal Untuk Peningkatan Gizi Keluarga	375.000.000	412.500.000	413.750.000	APBD Kabupaten Banyumas

	Sosialisasi manfaat kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orientasi Pemanfaatan Penggunaan Buku KIA/KMS	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU
	Sosialisasi manfaat KAP	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orientasi Pemanfaatan Penggunaan Buku KIA/KMS	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU

Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kelas ibu hamil	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
-------------------------	--	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan koordinasi LP/LS dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil; Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU
--	--	-----------------	---	--	---	--	---------------	---------------	---------------	-----

	Evaluasi pelaksanaan proses	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
--	-----------------------------	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pertemuan koordinasi LP/LS dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil; Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	DAU
--	--	-----------------	---	--	---	--	---------------	---------------	---------------	-----

Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik PMBA sesuai anjuran

PENDEK ATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			
							2024	2025	2026	SUMBER DAN A
KOORDI NASI	Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pemantauan PMBA dan Pola Asuh	42.000.000	47.000.000	52.000.000	APBD

ADVOKASI	Penyusunan Kebijakan tindak lanjut /rewev Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Banyumas	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Konvergensi dari semua OPD dan Rumah Sakit di Kabupaten Banyumas sebagai pendamping tiap Kecamatan dalam upaya penurunan stunting	##### ####	##### ####	##### ####	DAU
MOBILISASI SOSIAL	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rangkaian kegiatan HKN	96.450.000	101.272.500	101.272.500	APBD

	Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten	39.000.000	40.000.000	42.000.000	APBD
--	--	----------	--	---	---	---	------------	------------	------------	------

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga	Lomba Masak berbahan Baku Ikan	550.00 0.000	550.00 0.000	565.00 0.000	APBD
--	--	---------------------	--	--	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	------

				Daerah Kabupaten/ Kota						
	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian PMT susu bagi balita kurus dan ibu hamil KEK, konseling gizi pada posyandu				DAU

			MASYARAKAT	Kabupaten/Kota						
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Fasilitasi dalam pengerakan Tim Pendamping Keluarga bagi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Banyumas				DAK Non Fisik BOK B

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdaya an Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga	Sosialisasi PMBA	550.00 0.000	550.00 0.000	565.00 0.000	APBD
--	--	---------------------	--	--	---	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

				Daerah Kabupaten/ Kota						
	Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makanan Ikan)	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Gemar	45.000. 000	45.000. 000	65.000. 000	APBD

						Makan Ikan di Pendidikan PAUD dan Dasar				
		Dinkanna k	Program Pengolahan dan Pemasaran	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Masyarakat Memasyarakatkan Makan Ikan)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	

KAMPAN YE PUBLIK	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	sosialisasi dan edukasi melalui medsos, media cetak dan media luar ruang	294.44 6.800	335.66 9.000	335.66 9.000	APBD
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Fasilitasi Pemenuhan Alat peraga dalam pemberian informasi terkait program KB	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	DAK NON FISIK BOK B

		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Gemar Makan Ikan di Pendidikan PAUD dan Dasar	5.000.000	5.000.000	10.000.000	APBD
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial, Media Cetak, Media Luar Ruang	26.691.206	27.308.120	28.603.666	APBD

	Talk show, eksplorasi praktik baik	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rembug stunting; talkshow radio					DAU
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931		APBD
KAP	Konseling dan penyuluhan langsung	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Melakukan kegiatan Akzi Bergizi; Edukasi PMBA dan pemberian PMT Tinggi					DAU

			MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota		Protein untuk baduta stunted				
	Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Lomba masak B2SA	550.00 0.000	550.00 0.000	565.00 0.000	APBD	

				Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Dinpertan KP	Penyediaan dan pengembang an prasarana pertanian	Pengemba ngan prasarana pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ LCP2B	Kegiatan Pangan Lestari (P2L)	150.00 0.000	165.00 0.000	165.50 0.000	DAK NON FISIK
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaa n dan Penyalura n Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuha n Daerah Kabupate	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pelatihan Pemanfaat an Tanah Pekaranga n dan Pelatihan Keamanan dan Gizi	160.00 0.000	176.00 0.000	193.60 0.000	APBD Kab.

				n/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan						
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Perberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Olahan Pangan Lokal Untuk Peningkatan Gizi Keluarga	375.00 0.000	412.50 0.000	413.75 0.000	APBD Kab.

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tenaga Kesehatan dalam Lakakarya MTBS dan Gizi Buruk				DAU
Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan Pemberian ASI eksklusif dan PMBA	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring dan Evaluasi MTBS	493.264.500	494.448.000	494.448.000	DAU
Evaluasi pelaksanaan proses	Bappedalitbang		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring dan Evaluasi SDIDTK	493.26 4.500	494.44 8.000	494.44 8.000	DAU
--	--	-----------------	---	--	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

Perilaku kunci 4 : Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya

PENDEK ATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			
							2024	2025	2026	SUMBER DAN A
KOORDI NASI	Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	42.000.000	47.000.000	52.000.000	APB D

ADVOKASI	Penyusunan Kebijakan tentang posyandu balita aktif	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Konvergen si dari semua OPD dan Rumah Sakit di Kabupaten Banyumas sebagai pendamping tiap Kecamatan dalam upaya penurunan stunting	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU
----------	--	-----------------	---	--	---	--	---------------	---------------	---------------	-----

		Dinsospermasdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Advokasi Posyandu sebagai LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)	50.000.000	50.000.000	72.000.000	APB D
--	--	-----------------	---	--	---	---	------------	------------	------------	-------

				Daerah Kabupate n/Kota						
MOBILI SASI SOSIAL	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Peningkat an Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi, Kemitraan dan Pemberday aan	Rangkaian kegiatan HKN	96.450.0 00	101.272. 500	101.272. 500	APB D

	gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawa nan Sosial,		MASYARAK AT	Daerah Kabupate n/Kota	Masyaraka t					
		DPPKBP3 A	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksana an Pembang unan Keluarga melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten	39.000.0 00	40.000.0 00	42.000.0 00	APB D

	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Konseling Kelas Ibu Hamil	1.857.328.916	1.873.673.000	1.873.673.000	
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi dalam pengerakan Tim Pendamping Keluarga bagi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Banyumas	8.100.000.000	8.100.000.000	8.400.000.000	DAK Non Fisik BOK B

					Keluarga/ UPPKS)					
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

		Dinsospermasdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Monev Strata Posyaandu	50.000.000	50.000.000	72.000.000	APB D
--	--	-----------------	---	--	---	------------------------	------------	------------	------------	-------

				Daerah Kabupate n/Kota						
KAMPAN YE PUBLIK	Penyebarluas an informasi, testimoni,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaa n Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaa n Pelayanan Promosi Kesehatan	sosialisasi dan edukasi melalui medsos, media cetak dan media luar ruang	294.446. 800	335.669. 000	335.669. 000	

			MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota						
		DPPKBP3 A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Fasilitasi Pemenuhan Alat peraga dalam pemberian informasi terkait program KB	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DAK NON FISIK BOK B

		Dinkominf o	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial, Media Cetak, Media Luar Ruang	26.691.2 06	27.308.1 20	28.603.6 66	APB D
	Talk show, eksplorasi praktik baik	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rembug stunting; talkshow radio	2.000.00 0.000	2.019.00 0.000	2.019.00 0.000	DAU

		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931	APBD
KAP	Konseling dan penyuluhan langsung	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemantauan tumbuh kembang secara teratur melalui Posyandu, konseling gizi di posyandu	2.000.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000	DAU

Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kunjungan ke posyandu bagi balita	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring dan Evaluasi MTBS	493.264.500	494.448.000	494.448.000	DAU

				Kabupaten/Kota						
	Evaluasi pelaksanaan proses	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monitoring dan Evaluasi SDIDTK	493.264.500	494.448.000	494.448.000	DAU
--	--	-----------------	---	--	--	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

Perilaku kunci 5 : Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menerapkan CTPS dengan air mengalir

PENDEKATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			
							2024	2025	2026	SUMBER DAN A
KOORDINASI	Pembentukan Pokja	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penerapan PHBS di Kecamatan	42.000.000	47.000.000	52.000.000	APBD

ADVOKASI	Penyusunan Kebijakan tentang penyediaan sarana prasarana tempat Cuci tangan pakai sabun	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Advokasi pembentuk an Pokjandal Posyandu / Terkait Pelaksanaan Peran Pokjandal Posyandu kepada LS	500.000.000	505.000.000	505.000.000	DAK Non Fisik
----------	---	-----------------	--	---	--	---	-------------	-------------	-------------	---------------

MOBILISASI SOSIAL	Penggerakan masyarakat pada saat peringatan hari kesehatan nasional, hari kesatuan gerak PKK, Hari Keluarga Nasional, Hari Kesetiakawanan Sosial,	Dinsospermasdes	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Praktek Cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun	550.000.000	550.000.000	565.000.000	APBD
-------------------	---	-----------------	---	--	---	---	-------------	-------------	-------------	------

				Daerah Kabupaten/ Kota						
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rangkaian kegiatan HKN	96.450.000	101.272.500	101.272.500	APBD
	Kunjungan/konseling Posyandu dan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Konseling Kelas Ibu Hamil tentang CTPS	1.857.328.916	##### ####	##### ####	DAU

		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksana an Pembangu nan Keluarga melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kabupaten	39.000.0 00	40.000. 000	42.000. 000	DAK NON FISIK BOK B
--	--	----------	---	--	---	--	----------------	----------------	----------------	---------------------------------

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Penataan, Pemberday aan dan Pendayagu naan Kelebaga an Lembaga Kemasyara katan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyaraka t Hukum	Monev Strata Posyaandu	50.000.0 00	50.000. 000	72.000. 000	APBD
--	--	---------------------	--	--	--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	------

				Daerah Kabupate n/Kota							
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

KAMPAN YE PUBLIK	Penyebarluasan informasi, testimoni,	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	sosialisasi dan edukasi melalui medsos, media cetak dan media luar ruang	294.446.800	335.669.000	335.669.000	DAU
		DPPKBP3A	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Fasilitasi Pemenuhan Alat peraga dalam pemberian informasi terkait program KB	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DAK NON FISIK BOK B

		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial, Media Cetak, Media Luar Ruang	26.691.206	27.308.120	28.603.666	APBD
	Talk show, eksplorasi praktik baik	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rembug stunting; talkshow radio	2.000.000.000	##### ####	##### ####	DAU
		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931	APBD

				Kabupaten/Kota						
KAP	Konseling dan penyuluhan langsung	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Konseling dan Penyuluhan PHBS	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Penurunan Angka Stunting	15.000.000	15.000.000	20.000.000	APBD

		Dinsosper masdes	PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan yang Bergerak di Bidang Pemberda yaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupate n/Kota serta Pemberda yaan Masyarak at Hukum Adat yang Masyarak at Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyeleng araan Gerakan Pemberday aan Masyaraka t dan Kesejahter aan Keluarga	Sosialisasi pada saat Rakor TP PKK	550.000. 000	550.00 0.000	565.00 0.000	APBD
--	--	---------------------	--	--	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	------

				Daerah Kabupate n/Kota						
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan cuci tangan pakai sabun	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU

		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan dalam rangka Penurunan Angka Stunting	10.000.000	10.000.000	15.000.000	APBD
	Evaluasi pelaksanaan proses	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU
--	--	-----------------	---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-----

Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat

PENDEK ATAN	BENTUK KEGIATAN	OPD	RENSTRA 2024 - 2026							
			PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATA N	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN			SUMBE R DANA
							2024	2025	2026	
KOORDI NASI	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Bappedalit bang	PROGRA M KOORDIN ASI DAN SINKRONI SASI PERENCA NAAN PEMBAN GUNAN DAERAH	Koordinas i Perencan aan Bidang Pemerinta han dan Pembang unan Manusia	Koordinas i Pelaksana an Sinergitas dan Harmonis asi Perencana an Pembang unan Daerah Bidang Pembang unan Manusia	Koordinasi dan Verifikasi STBM	42.000. 000	47.000.0 00	52.000.0 00	APBD

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pertemuan bulanan Pokja STBM	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU
	Pertemuan bulanan Pokja STBM	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pertemuan bulanan Pokja STBM	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU

ADVOKASI	Sosialisasi kebijakan tentang PHBS (jamban sehat)	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sosialisasi kebijakan PHBS (jamban sehat)	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU
	Diskusi	Kemenag	Kerukunan Umat dan Layanan kehidupan Beragama	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Sosialisasi dan diskusi kebijakan Pemerintah terkait (PHBS Jaman Sehat)	Curah Pendapat saat Perkumpulan Organisasi Masyarakat dan Kumpulan Warga	47.500.000	47.500.000	47.500.000	Kemena g APBN

		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Advokasi dan sosialisasi Kesling, PHBS	181.150.500	197.454.000	197.454.000	DAU
MOBILISASI SOSIAL	Pembuatan materi khotbah Jumat dan ceramah yang memuat tentang risiko BABS	Kemenag	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Memberdayakan Kelompok sasaran Penyuluh Agama secara individu dan kelompok	Pembuatan Naskah Khutbah dan ceramah bagi Penyuluh Agama se-Kabupaten Banyumas terkait manfaat menggunakan Jamban sehat/ceramah yang memuat	47.500.000	47.500.000	47.500.000	Kemena g APBN

						tentang risiko BABS				
	Challenge Tiktok/ Instagram	Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosialisasi dan Edukasi melalui Media Sosial	26.691.206	27.308.120	28.603.666	APBD
KAMPAN YE PUBLIK	Talkshow interaktif	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	NGOPI MASE : Ngolah Pikir Banyumas Sehat	50.000.000	51.500.000	51.500.000	DAU

		Dinkominfo	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Talkshow di Radio	36.141.355	36.976.691	38.730.931	APBD
	Webinar/seminar	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	NGOPI MASE : Ngolah Pikir Banyumas Sehat	50.000.000	51.500.000	51.500.000	APBD

KAP	Pelatihan teknik KAP untuk Nakes dan Kader	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan)		2.224.886.000	2.224.886.000	DAU
	Pembuatan Materi KIE interaktif	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Program Promosi Kesehatan	Pembuatan Leaflet, poster, media promosi di media sosial		2.224.886.000	2.224.886.000	DAU

Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan rencana pemantauan dan evaluasi KPP dan mekanismenya	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
-------------------------	---	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

	Evaluasi KPP oleh mitra universitas	Bappedalitbang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerapan Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	APBD
--	-------------------------------------	----------------	--	--	--	---	------------	------------	------------	------

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN